

Yth.

Direksi/Pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun secara syariah, di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/SEOJK.08/2024
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN RENCANA DAN LAPORAN
REALISASI LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30/OJK) dan amanat Pasal 13 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan rencana dan laporan realisasi literasi keuangan dan inklusi keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah:
 - a. LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan
 - b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.
4. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan PUJK yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.

5. Edukasi Keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

II. BENTUK DAN PENYUSUNAN LAPORAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

1. PUJK memiliki kewajiban menyusun dan menyampaikan:
 - a. laporan Literasi Keuangan; dan
 - b. laporan Inklusi Keuangan, kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. laporan Literasi Keuangan
 - 1) laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan
 - 2) laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
 - b. laporan Inklusi Keuangan
 - 1) laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; dan
 - 2) laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.
3. Laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 1) memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. kategori kegiatan;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. cakupan kegiatan;
 - e. bentuk pelaksanaan;
 - f. metode pelaksanaan;
 - g. materi;
 - h. sasaran dan/atau jumlah peserta;
 - i. jadwal;
 - j. wilayah;
 - k. frekuensi pelaksanaan;
 - l. sumber dan jumlah biaya;
 - m. kerja sama/kolaborasi pelaksanaan;
 - n. inisiator kegiatan;
 - o. indikator evaluasi; dan
 - p. bentuk evaluasi,yang disusun dengan mengacu pada format dan pedoman penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Romawi I Bagian A dan Romawi II Bagian A Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b angka 1) memuat:
 - a. kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang memuat:
 - 1) nama kegiatan;
 - 2) kategori kegiatan;
 - 3) tujuan kegiatan;
 - 4) cakupan kegiatan; dan
 - 5) bentuk pelaksanaan;
 - b. sasaran kegiatan;
 - c. jumlah target konsumen;
 - d. jadwal;
 - e. wilayah;

- f. frekuensi pelaksanaan;
 - g. kerja sama/kolaborasi pelaksanaan;
 - h. indikator evaluasi; dan
 - i. bentuk evaluasi,
- yang disusun dengan mengacu pada format dan pedoman penyusunan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Romawi I Bagian B dan Romawi II Bagian B Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 2) memuat:
- a. nama kegiatan;
 - b. kategori kegiatan;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. cakupan kegiatan;
 - e. bentuk pelaksanaan;
 - f. metode pelaksanaan;
 - g. materi;
 - h. sasaran dan/atau jumlah peserta;
 - i. jadwal;
 - j. wilayah;
 - k. frekuensi pelaksanaan;
 - l. sumber dan jumlah biaya;
 - m. kerja sama/kolaborasi pelaksanaan;
 - n. inisiator kegiatan;
 - o. indikator evaluasi;
 - p. bentuk evaluasi;
 - q. hasil evaluasi; dan
 - r. dokumentasi,
- yang disusun dengan mengacu pada format dan pedoman penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Romawi I Bagian A dan Romawi III Bagian A Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 2) memuat:
- a. kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang memuat:
 - 1) nama kegiatan;
 - 2) kategori kegiatan;
 - 3) tujuan kegiatan;
 - 4) cakupan kegiatan; dan
 - 5) bentuk pelaksanaan;
 - b. sasaran kegiatan;
 - c. jumlah target konsumen;
 - d. jadwal;
 - e. wilayah;
 - f. frekuensi pelaksanaan;
 - g. kerja sama/kolaborasi pelaksanaan;
 - h. indikator evaluasi;
 - i. bentuk evaluasi;
 - j. hasil evaluasi; dan
 - k. dokumentasi,
- yang disusun dengan mengacu pada format dan pedoman penyusunan laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Romawi I Bagian B dan

Romawi III Bagian B Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. PENYAMPAIAN LAPORAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

1. Laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan disampaikan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan. Apabila tanggal 30 November jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
2. Laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan disampaikan secara semesteran dan dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Apabila batas akhir penyampaian laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan realisasi disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
3. Penyesuaian laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Perubahan laporan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) semester dan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

IV. PENANGGUNG JAWAB LAPORAN

PUJK menunjuk salah satu anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan melalui kebijakan internal masing-masing PUJK.

V. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Penyampaian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan
 - a. Penyampaian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan c.q. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.
 - b. Penyampaian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui sistem pelaporan elektronik pengawasan perilaku PUJK, edukasi, dan pelindungan konsumen yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b mengalami gangguan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan informasi terjadinya gangguan melalui:
 - 1) sistem pelaporan elektronik;
 - 2) surat elektronik kepada PUJK yang telah memiliki akses sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
 - 3) surat kepada PUJK.
 - d. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyampaikan pemberitahuan informasi terjadinya gangguan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Otoritas

- Jasa Keuangan dapat menyampaikan pemberitahuan dimaksud melalui laman situs web Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Dalam hal sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b mengalami gangguan, PUJK menyampaikan laporan secara daring melalui surat elektronik resmi PUJK kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai salinan digital atau hasil pindai (*scan*) surat pengantar yang ditandatangani oleh salah satu anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
 - f. Penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - g. Dalam hal sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf f mengalami gangguan, penyampaian laporan dilakukan secara luar jaringan (*luring*) dalam bentuk salinan elektronik (*softcopy*) yang disimpan dalam perangkat keras, antara lain *compact disc*, *flashdisk*, serta media penyimpanan lainnya dengan dilengkapi surat pengantar yang ditandatangani oleh salah satu anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
 - h. Penyampaian laporan secara *luring* sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) melalui perusahaan jasa pengiriman.
 - i. Penyampaian laporan secara *luring* sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada:
 - 1) Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi
Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 2
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jalan M.H. Thamrin No. 2, Gambir, Jakarta 10110; atau
u.p. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Wisma Mulia 2 lantai 25
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav-42, Jakarta 12710,
bagi PUJK yang berkantor pusat atau kantor cabang dari PUJK yang berkedudukan di luar negeri, yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten.
 - 2) Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat PUJK, bagi PUJK yang memiliki kantor pusat berkedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten.
 - j. PUJK yang telah menyampaikan laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan melalui:
 - 1) alamat surat elektronik; atau

- 2) salinan elektronik (*softcopy*), dikarenakan sistem pelaporan elektronik mengalami gangguan, memiliki kewajiban menyampaikan kembali laporan melalui sistem pelaporan elektronik paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dinyatakan bahwa gangguan sistem telah teratasi.
- k. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan bahwa gangguan sistem telah teratasi melalui:
 - 1) sistem pelaporan elektronik; dan/atau
 - 2) alamat surat elektronik kepada PUJK yang telah memiliki kode pengguna (*user code*).
- l. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyampaikan pemberitahuan bahwa gangguan sistem telah teratasi melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf k, Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan pemberitahuan dimaksud melalui laman situs web Otoritas Jasa Keuangan.
- m. PUJK dinyatakan telah menyampaikan laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) untuk penyampaian secara daring melalui sistem pelaporan elektronik, dibuktikan dengan pemberitahuan terselesaikannya pengisian laporan yang disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik;
 - 2) untuk penyampaian secara daring melalui alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibuktikan dengan pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui alamat surat elektronik; atau
 - 3) untuk penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf g, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
- n. Dalam hal PUJK melakukan penyesuaian atau perubahan laporan rencana Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, tata cara penyampaian penyesuaian atau perubahan laporan rencana dilakukan dengan tetap mengacu pada hal-hal sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- o. Dalam hal terdapat perubahan alamat surat elektronik untuk penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf f dan/atau alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf i, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat dimaksud melalui surat atau pengumuman yang disampaikan melalui:
 - 1) sistem pelaporan elektronik;
 - 2) alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan kepada PUJK yang telah memiliki kode pengguna (*user code*); dan/atau
 - 3) laman situs web Otoritas Jasa Keuangan.
2. Sistem pelaporan elektronik pengawasan perilaku PUJK, edukasi, dan perlindungan konsumen
 - a. PUJK harus memiliki akses terhadap sistem pelaporan elektronik untuk menyampaikan laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada Romawi V angka 1 huruf b.

- b. PUJK menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mencantumkan nama, alamat surat elektronik, dan nomor telepon anggota direksi atau petugas PUJK yang akan diberikan akses, untuk memperoleh akses sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Permohonan PUJK sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- d. PUJK memastikan secara berkala:
 - 1) pengguna (*user*) aktif merupakan anggota direksi dan/atau petugas yang memiliki kewenangan dan memahami pengisian laporan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan;
 - 2) menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika terdapat perubahan pengguna (*user*) dan menunjuk pengguna (*user*) baru, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan melakukan penonaktifan (deaktivasi) pengguna (*user*) yang tidak dipergunakan;
 - 3) menjaga kerahasiaan kode pengguna (*user code*) dan kata sandi (*password*) yang telah diberikan; dan
 - 4) kode pengguna (*user code*) dan kata sandi (*password*) yang diberikan digunakan sesuai dengan ketentuan.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Penyampaian pengajuan permohonan pengecualian pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan disampaikan kepada:
 - a. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan u.p Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi atau Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi PUJK yang berkantor pusat atau kantor cabang dari PUJK yang berkedudukan di luar negeri, yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten.
 - b. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan u.p Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat PUJK, bagi PUJK yang memiliki kantor pusat berkedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Banten.
- 2. Penyampaian pengajuan permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan secara luring yang ditandatangani oleh salah satu anggota direksi PUJK.

VII. KETENTUAN PENUTUP

- 1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat;
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan; dan

- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERILAKU PELAKU USAHA JASA
KEUANGAN, EDUKASI, DAN
PELINDUNGAN KONSUMEN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/SEOJK.08/2024
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN RENCANA DAN LAPORAN
REALISASI LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

**FORMAT DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA DAN
REALISASI LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN**

DAFTAR ISI

I. FORMAT LAPORAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN.....	3
A. Literasi Keuangan	3
B. Inklusi Keuangan	26
II. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA KEGIATAN	38
A. Penyusunan Laporan Rencana Kegiatan Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan	38
B. Penyusunan Laporan Rencana Kegiatan Untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan	72
III. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI KEGIATAN	83
A. Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan	83
B. Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan	89

I. FORMAT LAPORAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

A. Literasi Keuangan

**LAPORAN RENCANA/REALISASI KEGIATAN UNTUK
MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN**
PERIODE LAPORAN RENCANA: Tahun *(diisi dengan tahun)*
PERIODE LAPORAN REALISASI:
Semester.... *(diisi dengan angka)* **Tahun** *(diisi dengan tahun)*
..... *(diisi dengan nama PUJK)*

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
1.	Nama Kegiatan	
2.	Kategori Kegiatan	☐ konvensional ☐ syariah
3.	Tujuan Kegiatan	
4.	Cakupan Kegiatan	☐ Edukasi Keuangan ☐ pengembangan sarana dan prasarana
5.	Bentuk Pelaksanaan	☐ Edukasi Keuangan ☐ sosialisasi ☐ lokakarya (<i>workshop</i>) ☐ pendampingan ☐ pelatihan komunitas (<i>training of community/ToC</i>) ☐ program penjangkauan (<i>outreach program</i>) ☐ permainan (<i>gamification</i>) ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) Apakah PUJK menyampaikan simulasi pada kegiatan Edukasi Keuangan? ☐ ya ☐ tidak ☐ Pengembangan Sarana dan Prasarana 1. Pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan: ☐ pembelajaran elektronik (<i>e-learning</i>) ... (<i>sebutkan pembangunan/pengembangan yang dilakukan</i>) ☐ situs web (<i>website</i>) ... (<i>sebutkan pembangunan/pengembangan yang dilakukan</i>) ☐ aplikasi seluler (<i>mobile application</i>) ... (<i>sebutkan pembangunan/pengembangan yang dilakukan</i>) ☐ pembuatan media sosial/akun media sosial ... (<i>sebutkan pembangunan/pengembangan yang dilakukan</i>) ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) 2. Penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat: ☐ buku seri Literasi Keuangan untuk pendidikan formal

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ buku saku pengelolaan keuangan ☐ buku Literasi Keuangan untuk komunitas ☐ majalah edukasi konsumen ☐ lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> 3. Penyediaan sumber daya manusia ☐ perekrutan sumber daya manusia yang kompeten untuk pelaksanaan kegiatan Edukasi Keuangan ☐ lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> 4. Pelatihan sumber daya manusia ☐ pelatihan untuk pelatih (<i>training of trainer/ToT</i>) ☐ pelatihan untuk fasilitator (<i>training of facilitator/ToF</i>) ☐ lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> 5. Penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan (<i>dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta</i>) ☐ penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan ☐ selebaran ☐ brosur ☐ lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>
6.	Metode Pelaksanaan	☐ Edukasi Keuangan ☐ tatap muka (memerlukan kehadiran fisik) ☐ tanpa tatap muka, dilakukan dengan: ☐ platform pertemuan secara daring (<i>online meeting platform</i>) ☐ media sosial dengan kegiatan secara langsung (<i>live</i>) ☐ media lainnya dengan kegiatan secara langsung (<i>live</i>), ... <i>(sebutkan)</i> ☐ tatap muka dan tanpa tatap muka (<i>hybrid</i>) <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i> ☐ Pengembangan Sarana dan Prasarana ☐ pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan: ☐ fisik, berupa... ☐ non fisik (contoh: digital, media massa), berupa... ☐ penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat: ☐ dipublikasikan secara cetak ☐ dipublikasikan secara noncetak ☐ penyediaan sumber daya manusia ☐ proses rekrutmen langsung ☐ melalui pihak ketiga ☐ lainnya..... <i>(sebutkan)</i>

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ pelatihan sumber daya manusia ☐ tatap muka (memerlukan kehadiran fisik) ☐ tanpa tatap muka, dilakukan dengan: ☐ platform pertemuan secara daring (<i>online meeting platform</i>) ☐ media sosial dengan kegiatan secara langsung (<i>live</i>) ☐ media lainnya dengan kegiatan secara langsung (<i>live</i>), sebutkan ☐ tatap muka dan tanpa tatap muka (<i>hybrid</i>) (beri tanda pada salah satu pilihan) ☐ Penyediaan Informasi Karakteristik Produk dan/atau Layanan (<i>dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta</i>) ☐ cetak ☐ noncetak (beri tanda pada salah satu pilihan)
7.	Materi	A. Edukasi Keuangan Materi Edukasi Keuangan ☐ Karakteristik Sektor Jasa Keuangan ☐ sektor perbankan ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor perbankan ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor pasar modal , keuangan derivatif, dan bursa karbon secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ Karakteristik Produk dan/atau Layanan ☐ deskripsi ☐ manfaat ☐ risiko ☐ biaya ☐ hak dan kewajiban ☐ cara mengakses ☐ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa ☐ lainnya: (sebutkan) ☐ Pengelolaan Keuangan ☐ perencanaan keuangan untuk masa depan ☐ identifikasi kesehatan keuangan, termasuk pengelolaan utang dan penyediaan dana darurat ☐ tahapan dalam pengelolaan keuangan ☐ pencatatan aset/harta yang dimiliki ☐ pencatatan pemasukan dan pengeluaran (<i>budgeting</i>), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/nonrutin bulanan/tahunan ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ Perpajakan ☐ Perpajakan terkait produk dan/atau layanan

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ lainnya: (sebutkan) ☐ Materi Edukasi Keuangan digital (bagi PUJK yang memiliki produk dan/atau layanan digital) ☐ pengetahuan mengenai produk dan/atau layanan keuangan digital ☐ penggunaan produk dan/atau layanan keuangan digital secara bijak ☐ kesadaran risiko keuangan digital dan cara memitigasinya ☐ memahami hak, kewajiban, dan prosedur untuk melakukan pengaduan ☐ modus kejahatan keuangan berbasis digital dan cara menghindarinya ☐ kesadaran atas perlindungan data pribadi ☐ lainnya: ... (sebutkan) B. Pengembangan sarana dan prasarana 1. Pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan Materi Edukasi Keuangan ☐ Karakteristik Sektor Jasa Keuangan ☐ sektor perbankan ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor perbankan ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor pasar modal , keuangan derivatif, dan bursa karbon secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ pelaku di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ Karakteristik Produk dan/atau Layanan ☐ deskripsi ☐ manfaat ☐ risiko ☐ biaya ☐ hak dan kewajiban ☐ cara mengakses ☐ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa ☐ lainnya: (sebutkan) ☐ Pengelolaan Keuangan ☐ perencanaan keuangan untuk masa depan ☐ identifikasi kesehatan keuangan, termasuk pengelolaan utang dan penyediaan dana darurat ☐ tujuan pengelolaan keuangan ☐ tahapan dalam pengelolaan keuangan ☐ pencatatan aset/harta yang dimiliki

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ perencanaan keuangan untuk masa depan ☐ identifikasi kesehatan keuangan, termasuk pengelolaan utang dan penyediaan dana darurat ☐ tujuan pengelolaan keuangan ☐ tahapan dalam pengelolaan keuangan ☐ pencatatan aset/harta yang dimiliki ☐ pencatatan pemasukan dan pengeluaran (<i>budgeting</i>), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/nonrutin bulanan/tahunan ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ Perpajakan terkait produk dan/atau layanan ☐ perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ lainnya: (<i>sebutkan</i>) ☐ Materi Edukasi Keuangan digital ☐ pengetahuan mengenai produk dan/atau layanan keuangan digital ☐ penggunaan produk dan/atau layanan keuangan digital secara bijak ☐ kesadaran risiko keuangan digital dan cara memitigasinya ☐ memahami hak, kewajiban, dan prosedur untuk melakukan pengaduan ☐ modus kejahatan keuangan berbasis digital dan cara menghindarinya. ☐ kesadaran atas perlindungan data pribadi ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) 3. penyediaan dan/atau pelatihan sumber daya manusia ☐ penyediaan sumber daya manusia ☐ keahlian sumber daya manusia yang direkrut: (<i>sebutkan</i>) ☐ pelatihan sumber daya manusia (<i>beri tanda pada salah satu pilihan</i>) Materi Edukasi Keuangan ☐ Karakteristik Sektor Jasa Keuangan ☐ sektor perbankan ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor perbankan ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>)

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor pasar modal , keuangan derivatif, dan bursa karbon secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto

No.	Komponen	Rencana/Realisasi	
		☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ Karakteristik Produk dan/atau Layanan ☐ deskripsi ☐ manfaat ☐ risiko ☐ biaya ☐ hak dan kewajiban ☐ cara mengakses ☐ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa ☐ lainnya: (sebutkan) ☐ Pengelolaan Keuangan ☐ perencanaan keuangan untuk masa depan ☐ identifikasi kesehatan keuangan, termasuk pengelolaan utang dan penyediaan dana darurat ☐ tujuan pengelolaan keuangan ☐ tahapan dalam pengelolaan keuangan ☐ pencatatan aset/harta yang dimiliki ☐ pencatatan pemasukan dan pengeluaran (<i>budgeting</i>), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/nonrutin bulanan/tahunan ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ Perpajakan terkait produk dan/atau layanan ☐ perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ lainnya: (sebutkan) C. Penyediaan Informasi Karakteristik Produk dan/atau Layanan (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta) ☐ deskripsi ☐ manfaat ☐ risiko ☐ biaya ☐ cara mengakses ☐ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa	
8.	Sasaran dan/atau Jumlah Peserta	Sasaran Peserta	Jumlah Peserta

No.	Komponen	Rencana/Realisasi	
		Jenis Kelamin ☐ laki-laki ☐ perempuan ☐ tidak ditentukan <i>(dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan)</i> Keterangan: <i>Pilihan “tidak ditentukan” jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan untuk jenis kelamin tertentu.</i>	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh ... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		Usia ☐ di bawah 15 tahun ☐ 15-17 tahun ☐ 18-25 tahun ☐ 26-35 tahun ☐ 36-50 tahun ☐ 51-79 tahun ☐ di atas 79 tahun ☐ Tidak ditentukan <i>(dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan)</i> Keterangan: <i>Pilihan “tidak ditentukan” jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan untuk usia tertentu.</i>	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh ... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh ... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh ... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh ... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh ... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh ... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		Sasaran Peserta	Jumlah Peserta
		☐ pekerja informal	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ petani	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh

No.	Komponen	Rencana/Realisasi	
		☐ nelayan	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ guru	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ dosen	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ penyuluh	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ profesional: ... (sebutkan)	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ karyawan	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)/ pedagang	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ Ibu rumah tangga	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ pelajar	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ mahasiswa	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ pemuda	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ pensiunan	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ calon Pekerja Migran Indonesia (calon PMI)	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ Keluarga Pekerja Migran Indonesia (KPMI)	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ penyandang disabilitas	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): ... (sebutkan)	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ masyarakat daerah tertinggal, terdalam, dan terluar	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ komunitas: ... (sebutkan)	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ masyarakat umum	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
		☐ lainnya: ... (sebutkan)	... peserta/ <i>click/ view/</i> unduh
9.	Jadwal	Dimulai ... selesai ...	
10.	Wilayah	☐ Perdesaan ☐ Perkotaan ☐ tidak ditentukan	

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		(dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan) Keterangan Pilihan “tidak ditentukan” jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan untuk desa/kota tertentu. Provinsi ☐ Aceh, kabupaten/kota.... ☐ Bali, kabupaten/kota.... ☐ Banten, kabupaten/kota.... ☐ Bengkulu, kabupaten/kota.... ☐ Gorontalo, kabupaten/kota.... ☐ DKI Jakarta, kabupaten/kota.... ☐ Jambi, kabupaten/kota.... ☐ Jawa Barat, kabupaten/kota.... ☐ Jawa Tengah, kabupaten/kota.... ☐ Jawa Timur, kabupaten/kota.... ☐ Kalimantan Barat, kabupaten/kota.... ☐ Kalimantan Selatan, kabupaten/kota.... ☐ Kalimantan Tengah, kabupaten/kota.... ☐ Kalimantan Timur, kabupaten/kota.... ☐ Kalimantan Utara, kabupaten/kota.... ☐ Kepulauan Bangka Belitung, kabupaten/kota.... ☐ Kepulauan Riau, kabupaten/kota.... ☐ Lampung, kabupaten/kota.... ☐ Maluku, kabupaten/kota.... ☐ Maluku Utara, kabupaten/kota.... ☐ Nusa Tenggara Barat, kabupaten/kota.... ☐ Nusa Tenggara Timur, kabupaten/kota.... ☐ Papua, kabupaten/kota.... ☐ Papua Barat, kabupaten/kota.... ☐ Papua Barat Daya, kabupaten/kota.... ☐ Papua Selatan, kabupaten/kota.... ☐ Papua Tengah, kabupaten/kota.... ☐ Papua Pegunungan, kabupaten/kota.... ☐ Riau, kabupaten/kota.... ☐ Sulawesi Barat, kabupaten/kota.... ☐ Sulawesi Selatan, kabupaten/kota.... ☐ Sulawesi Tengah, kabupaten/kota.... ☐ Sulawesi Tenggara, kabupaten/kota.... ☐ Sulawesi Utara, kabupaten/kota.... ☐ Sumatera Barat, kabupaten/kota.... ☐ Sumatera Selatan, kabupaten/kota.... ☐ Sumatera Utara, kabupaten/kota.... ☐ DI Yogyakarta, kabupaten/kota.... ☐ Luar Negeri, sebutkan ... <i>(ditulis dengan nama negara)</i> ☐ Tidak ditentukan Keterangan: Pilihan “Tidak ditentukan” jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan wilayah.

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
11.	Frekuensi Pelaksanaan	... kali pelaksanaan Keterangan: <i>Secara otomatis akan tertulis 1 (satu) kali. Apabila PUJK melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) kali maka mengisi pada form berikutnya.</i>
12.	Sumber dan Jumlah Biaya	Sumber Biaya ☐ anggaran Literasi Keuangan ☐ anggaran tanggung jawab sosial perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>) ☐ anggaran lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i> Jumlah Biaya (dalam Rupiah) <i>(diisi dengan rencana jumlah biaya yang dialokasikan)</i>
13.	Kerja Sama/Kolaborasi Pelaksanaan	Apakah kegiatan dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak lain? ☐ ya ☐ peran PUJK dan pihak lain (PUJK) dalam kegiatan (maksimal 3): 1. ... (<i>nama PUJK pelapor</i>) 2. ... (<i>nama pihak 1</i>) ... (<i>deskripsi dari peran pihak 1</i>), 3. ... (<i>nama pihak 2</i>) ... (<i>deskripsi dari peran pihak 2</i>), 4. ... (<i>nama pihak 3</i>) ... (<i>deskripsi dari peran pihak 3</i>). ☐ peran PUJK dan pihak lain (di luar PUJK) dalam kegiatan: 1. (<i>nama PUJK pelapor</i>) 2. ... (<i>nama pihak 1</i>) ... (<i>deskripsi dari peran pihak 1</i>), 3. ... (<i>nama pihak 2</i>) ... (<i>deskripsi dari peran pihak 2</i>), 4. ... (<i>nama pihak 3</i>) ... (<i>deskripsi dari peran pihak 3</i>). dst... ☐ tidak
14.	Inisiator Kegiatan	Inisiator Kegiatan: ☐ Pemerintah/Otoritas ☐ PUJK
15.	Indikator Evaluasi	A. Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Edukasi Keuangan ☐ kesesuaian bentuk pelaksanaan ☐ kesesuaian metode pelaksanaan ☐ kesesuaian materi ☐ kesesuaian sasaran peserta ☐ kesesuaian jumlah peserta ☐ kesesuaian waktu pelaksanaan ☐ kesesuaian wilayah pelaksanaan ☐ kesesuaian biaya yang dikeluarkan ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i> Pengembangan Sarana dan Prasarana

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ kesesuaian fungsi sarana dan prasarana dengan tujuan pengembangan ☐ kesesuaian materi dengan tujuan penyusunan materi ☐ kesesuaian kompetensi sumber daya manusia dengan tujuan penyediaan sumber daya manusia ☐ kesesuaian kompetensi sumber daya manusia dengan tujuan pelatihan sumber daya manusia ☐ lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) B. Evaluasi Dampak Kegiatan Edukasi Keuangan ☐ Pengetahuan ☐ pengetahuan peserta terhadap LJK formal ☐ pengetahuan peserta terhadap produk dan layanan keuangan formal ☐ pengetahuan peserta terhadap karakteristik produk dan layanan (deskripsi, manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajiban, cara mengakses, dan penanganan pengaduan) ☐ pengetahuan peserta tentang saluran penjualan produk dan layanan (<i>delivery channel</i>) ☐ keterampilan ☐ keterampilan peserta dalam melakukan perhitungan aritmatika sederhana ☐ keyakinan ☐ keyakinan peserta terhadap LJK formal ☐ keyakinan peserta terhadap kemampuan pengelolaan keuangan ☐ sikap ☐ peserta memiliki tujuan keuangan ☐ perilaku ☐ perilaku peserta dalam mencapai tujuan keuangan Pengembangan Sarana dan Prasarana 1. Pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan ☐ Ketersediaan sarana dan prasarana dalam bentuk ... (sebutkan) ☐ Kesesuaian fungsi sarana dan prasarana dengan tujuan pengembangan sarana dan prasarana dan/atau kebutuhan masyarakat ☐ lainnya:...(sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		2. Penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat ☐ Ketersediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen ☐ Kesesuaian materi dengan tujuan penyusunan materi ☐ Lainnya:...(sebutkan) (Dapat diisi lebih dari satu) 3. Penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan yang diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta) ☐ Ketersediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan yang dapat diakses konsumen dan/atau masyarakat ☐ Kesesuaian informasi dengan tujuan penyusunan informasi ☐ Lainnya:...(sebutkan) (Dapat diisi lebih dari satu) 4. Penyediaan sumber daya manusia ☐ Kesesuaian rekrutmen sumber daya manusia dengan kebutuhan Edukasi Keuangan ☐ Lainnya:...(sebutkan) (Dapat diisi lebih dari satu) 5. Pelatihan sumber daya manusia ☐ Kemampuan/keterampilan sumber daya manusia menyampaikan materi ☐ Kemampuan/keterampilan pelatih/fasilitator menyampaikan materi ☐ Lainnya:...(sebutkan) (Dapat diisi lebih dari satu)
16.	Bentuk Evaluasi	A. Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan 1. Metode Pengukuran ☐ menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan ☐ melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan ☐ lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) 2. Sarana Pengukuran ☐ pengukuran langsung

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ pengukuran melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi B. Evaluasi Dampak Kegiatan ☐ Edukasi Keuangan 1. Metode Pengukuran ☐ membandingkan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (<i>pre-test</i> dan <i>post-test</i>) ☐ survei untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku (Literasi Keuangan) perseorangan/kelompok tertentu ☐ kuesioner ☐ jajak pendapat ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) (<i>dapat diisi lebih dari satu</i>) 2. Sarana Pengukuran ☐ pengukuran langsung ☐ pengukuran melalui perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi ☐ Pengembangan Sarana dan Prasarana ☐ pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan 1. Metode Pengukuran ☐ memperhatikan data dan laporan dari periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola ☐ kuesioner ☐ jajak pendapat ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) (<i>dapat diisi lebih dari satu</i>) 2. Sarana Pengukuran ☐ pengukuran langsung ☐ pengukuran melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi ☐ penyediaan materi Edukasi Keuangan 1. Metode Pengukuran ☐ memperhatikan data dan laporan dari periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola ☐ kuesioner ☐ jajak pendapat ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) (<i>dapat diisi lebih dari satu</i>) 2. Sarana Pengukuran ☐ pengukuran langsung

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ pengukuran melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi ☐ Penyediaan dan/atau Pelatihan Sumber Daya Manusia 1. Metode Pengukuran ☐ penilaian (<i>assessment</i>) untuk menguji pemahaman, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia yang direkrut ☐ pengujian (<i>pre-test</i> dan <i>post-test</i>) untuk menguji pemahaman, keterampilan dan kemampuan <i>trainer</i>/fasilitator dalam melakukan penyampaian materi Edukasi Keuangan ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) (<i>dapat diisi lebih dari satu</i>) 2. Sarana Pengukuran ☐ pengukuran langsung ☐ pengukuran melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi ☐ Penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan yang diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta) 1. Metode Pengukuran ☐ memperhatikan data dan laporan dari periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola ☐ kuesioner ☐ jajak pendapat ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) (<i>dapat diisi lebih dari satu</i>) 2. Sarana Pengukuran ☐ pengukuran langsung ☐ pengukuran melalui perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi
17.	Hasil Evaluasi (Dilaporkan pada laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan)	☐ Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan <i>(secara sistem akan mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan pilihan penyesuaian)</i> Edukasi Keuangan ☐ kesesuaian bentuk pelaksanaan ☐ sesuai rencana, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ tidak sesuai rencana, ... (<i>deskripsi</i>) hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ kesesuaian metode pelaksanaan ☐ sesuai rencana, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ tidak sesuai rencana, ... (<i>deskripsi</i>)

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ kesesuaian materi ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ kesesuaian sasaran peserta ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ kesesuaian jumlah peserta ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ kesesuaian waktu pelaksanaan ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ kesesuaian wilayah pelaksanaan ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ kesesuaian biaya yang dikeluarkan ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... Pengembangan Sarana dan Prasarana ☐ kesesuaian fungsi sarana dan prasarana dengan tujuan pengembangan ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ kesesuaian materi dengan tujuan penyusunan materi ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ kesesuaian kompetensi sumber daya manusia dengan tujuan Edukasi Keuangan ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ...

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ sesuai rencana, ... (deskripsi) ☐ tidak sesuai rencana, ... (deskripsi) hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ Evaluasi Dampak Kegiatan (secara sistem akan mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan pilihan penyesuaian) ☐ Edukasi Keuangan ☐ Pengetahuan Membandingkan pengetahuan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan ☐ meningkat, ...% ☐ tetap ☐ menurun, ...% ☐ Keterampilan Membandingkan keterampilan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan ☐ meningkat, ...% ☐ tetap ☐ menurun, ...% ☐ Keyakinan Membandingkan keyakinan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan ☐ meningkat, ...% ☐ tetap ☐ menurun, ...% ☐ Sikap Membandingkan sikap sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan ☐ meningkat, ...% ☐ tetap ☐ menurun, ...% ☐ Perilaku Membandingkan perilaku sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan ☐ meningkat, ...% ☐ tetap ☐ menurun, ...% ☐ lainnya:... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) ☐ Pengembangan Sarana dan Prasarana ☐ pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan ☐ ketersediaan sarana dan prasarana: ☐ tersedia dalam bentuk: ... (sebutkan) ☐ tidak tersedia

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ kesesuaian fungsi sarana dan prasarana dengan tujuan pengembangan sarana dan prasarana dan/atau kebutuhan masyarakat ☐ sesuai: ... (<i>deskripsi</i>) ☐ tidak sesuai ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ penyediaan materi Edukasi Keuangan ☐ ketersediaan materi Edukasi Keuangan dan akses kepada konsumen dan/atau masyarakat ☐ tersedia dalam bentuk:... (<i>sebutkan</i>) ☐ tidak tersedia ☐ kesesuaian materi dengan tujuan penyusunan materi ☐ sesuai: ... (<i>deskripsi</i>) ☐ tidak sesuai ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ penyediaan sumber daya manusia ☐ kesesuaian rekrutmen sumber daya manusia dengan kebutuhan Edukasi Keuangan ☐ baik, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ cukup baik, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ kurang baik, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ lainnya:...(sebutkan) ☐ pelatihan sumber daya manusia ☐ kemampuan sumber daya manusia dalam menyampaikan materi ajar ☐ baik, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ cukup baik, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ kurang baik, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ kemampuan <i>trainer/facilitator</i> menyampaikan materi ajar ☐ baik, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ cukup baik, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ kurang baik, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan yang diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat ☐ ketersediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan yang diakses kepada konsumen dan/atau masyarakat ☐ tersedia dalam bentuk: .. (<i>sebutkan</i>) ☐ tidak tersedia

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ kesesuaian informasi dengan tujuan penyusunan materi ☐ sesuai: .. (<i>deskripsi</i>) ☐ tidak sesuai ☐ lainnya: .. (<i>Sebutkan</i>)
18	Dokumentasi (Dilaporkan pada laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan)	... (<i>diisi dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan</i>)

B. Inklusi Keuangan

LAPORAN RENCANA/REALISASI KEGIATAN UNTUK MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN

PERIODE LAPORAN RENCANA: Tahun (diisi dengan tahun)

PERIODE LAPORAN REALISASI:

Semester.... (diisi dengan angka) **Tahun** (diisi dengan tahun)

..... (diisi dengan nama PUJK)

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
1.	Nama Kegiatan	
2.	Kategori Kegiatan	☐ konvensional ☐ syariah
3.	Tujuan Kegiatan	
4.	Cakupan Kegiatan	☐ perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target konsumen; ☐ penyediaan produk dan/atau layanan; dan/atau ☐ keberlangsungan: a. akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan; dan/atau b. produk dan/atau layanan, yang telah dimiliki atau disediakan oleh PUJK untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau masyarakat.
5.	Bentuk Pelaksanaan	☐ fisik ☐ digital (beri tanda pada salah satu pilihan) Perluasan Akses Terhadap Lembaga, Produk, dan/atau Layanan Kepada Target Konsumen ☐ penambahan jaringan kantor ☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain: ... (sebutkan) ☐ penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan: ... (sebutkan) ☐ penyediaan sarana khusus kepada konsumen dan/atau masyarakat penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia: ... (sebutkan) ☐ dukungan terhadap program pemerintah atau otoritas ☐ penambahan jaringan kantor ☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain: ... (sebutkan) ☐ penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan: ... (sebutkan) ☐ penyediaan sarana khusus kepada konsumen dan/atau masyarakat penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia: ... (sebutkan) ☐ lainnya: (sebutkan) ☐ lainnya:.... (sebutkan) (beri tanda pada salah satu pilihan)

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		Penyediaan Produk dan/atau Layanan ☐ <u>penciptaan produk dan/layanan baru:</u> ☐ produk dan/atau layanan bersifat umum:... (sebutkan) ☐ produk dan/atau layanan sederhana: (sebutkan) ☐ produk dan/atau layanan tematik:.... (sebutkan) ☐ pelaksanaan program pemerintah atau otoritas ☐ produk dan/atau layanan bersifat umum:... (sebutkan) ☐ produk dan/atau layanan sederhana: (sebutkan) ☐ produk dan/atau layanan tematik:.... (sebutkan) ☐ <u>pengembangan produk dan/atau layanan:</u> ☐ produk dan/atau layanan bersifat umum: (penjelasan atas pengembangan yang dilakukan) ☐ produk dan/atau layanan sederhana: (penjelasan atas pengembangan yang dilakukan) ☐ produk dan/atau layanan tematik:.... (penjelasan atas pengembangan yang dilakukan) ☐ pelaksanaan program pemerintah atau otoritas ☐ produk dan/atau layanan bersifat umum: (penjelasan atas pengembangan yang dilakukan) ☐ produk dan/atau layanan sederhana: (penjelasan atas pengembangan yang dilakukan) ☐ produk dan/atau layanan tematik:.... (penjelasan atas pengembangan yang dilakukan) <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i> Keberlangsungan atas Akses dan/atau Produk dan/atau Layanan ☐ keberlangsungan atas akses <i>(jelaskan metode yang dilakukan dalam menjaga keberlangsungan)</i> ☐ jaringan kantor: ... (sebutkan) ☐ kerja sama dengan pihak lain: ... (sebutkan) ☐ saluran distribusi produk dan/atau layanan: ... (sebutkan) ☐ sarana khusus bagi konsumen dan/atau masyarakat penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia: ... (sebutkan) ☐ lainnya:.... (sebutkan) <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i> ☐ keberlangsungan atas produk dan/atau layanan

No.	Komponen	Rencana/Realisasi	
		☐ penambahan jumlah konsumen dan/atau masyarakat, yang memiliki produk dan/atau layanan ☐ penambahan jumlah kepemilikan atas produk dan/atau layanan (beri tanda pada salah satu pilihan)	
6.	Sasaran Kegiatan dan Jumlah Target Konsumen	Sasaran Kegiatan	Jumlah Target Konsumen
		Jenis Kelamin ☐ laki-laki ☐ perempuan ☐ tidak ditentukan (dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan) Keterangan: Pilihan “tidak ditentukan” jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan untuk jenis kelamin tertentu.	☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen)
		Usia ☐ di bawah 15 tahun ☐ 15-17 tahun ☐ 18-25 tahun ☐ 26-35 tahun ☐ 36-50 tahun ☐ 51-79 tahun ☐ di atas 79 tahun ☐ tidak ditentukan (dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan) Keterangan: Pilihan “tidak ditentukan” jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan	☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen)

No.	Komponen	Rencana/Realisasi	
		<i>untuk usia tertentu.</i>	
		Sasaran	Jumlah Target Konsumen
		☐ pekerja informal	 (jumlah target konsumen)
		☐ petani	 (jumlah target konsumen)
		☐ nelayan	 (jumlah target konsumen)
		☐ guru	 (jumlah target konsumen)
		☐ dosen	 (jumlah target konsumen)
		☐ penyuluh	 (jumlah target konsumen)
		☐ profesional: ... (sebutkan)	 (jumlah target konsumen)
		☐ karyawan	 (jumlah target konsumen)
		☐ UMKM / pedagang	 (jumlah target konsumen)
		☐ Ibu rumah tangga	 (jumlah target konsumen)
		☐ pelajar	 (jumlah target konsumen)
		☐ mahasiswa	 (jumlah target konsumen)
		☐ pemuda	 (jumlah target konsumen)
		☐ pensiunan	 (jumlah target konsumen)
		☐ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	 (jumlah target konsumen)
		☐ calon Pekerja Migran Indonesia (calon PMI)	 (jumlah target konsumen)
		☐ Keluarga Pekerja Migran Indonesia (KPMI)	 (jumlah target konsumen)
		☐ penyandang disabilitas	 (jumlah target konsumen)
		☐ Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): ... (sebutkan)	 (jumlah target konsumen)
		☐ masyarakat daerah tertinggal, terdalam, dan terluar	 (jumlah target konsumen)
		☐ komunitas: ... (sebutkan)	 (jumlah target konsumen)

No.	Komponen	Rencana/Realisasi	
		☐ masyarakat umum	 (jumlah target konsumen)
		☐ lainnya: ... (sebutkan)	 (jumlah target konsumen)
7.	Jadwal	Dimulai ... Selesai ... (diisi dengan rencana tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)	
8.	Wilayah	☐ perdesaan ☐ perkotaan ☐ tidak ditentukan (dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan) Keterangan Pilihan “tidak ditentukan” jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan untuk desa/kota tertentu. Provinsi ☐ Aceh, kabupaten/kota.... ☐ Bali, kabupaten/kota.... ☐ Banten, kabupaten/kota.... ☐ Bengkulu, kabupaten/kota.... ☐ Gorontalo, kabupaten/kota.... ☐ DKI Jakarta, kabupaten/kota.... ☐ Jambi, kabupaten/kota.... ☐ Jawa Barat, kabupaten/kota.... ☐ Jawa Tengah, kabupaten/kota.... ☐ Jawa Timur, kabupaten/kota.... ☐ Kalimantan Barat, kabupaten/kota.... ☐ Kalimantan Selatan, kabupaten/kota.... ☐ Kalimantan Tengah, kabupaten/kota.... ☐ Kalimantan Timur, kabupaten/kota.... ☐ Kalimantan Utara, kabupaten/kota.... ☐ Kepulauan Bangka Belitung, kabupaten/kota.... ☐ Kepulauan Riau, kabupaten/kota.... ☐ Lampung, kabupaten/kota.... ☐ Maluku, kabupaten/kota.... ☐ Maluku Utara, kabupaten/kota.... ☐ Nusa Tenggara Barat, kabupaten/kota.... ☐ Nusa Tenggara Timur, kabupaten/kota.... ☐ Papua, kabupaten/kota.... ☐ Papua Barat, kabupaten/kota.... ☐ Papua Barat Daya, kabupaten/kota.... ☐ Papua Selatan, kabupaten/kota.... ☐ Papua Tengah, kabupaten/kota.... ☐ Papua Pegunungan, kabupaten/kota.... ☐ Riau, kabupaten/kota.... ☐ Sulawesi Barat, kabupaten/kota.... ☐ Sulawesi Selatan, kabupaten/kota.... ☐ Sulawesi Tengah, kabupaten/kota.... ☐ Sulawesi Tenggara, kabupaten/kota....	

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ Sulawesi Utara, kabupaten/kota.... ☐ Sumatera Barat, kabupaten/kota.... ☐ Sumatera Selatan, kabupaten/kota.... ☐ Sumatera Utara, kabupaten/kota.... ☐ DI Yogyakarta, kabupaten/kota.... ☐ Luar Negeri, sebutkan ... <i>(ditulis dengan nama Negara)</i> ☐ Tidak ditentukan Keterangan: <i>Pilihan “tidak ditentukan” jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan wilayah.</i>
9.	Frekuensi Pelaksanaan	... kali pelaksanaan <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>
10.	Kerja Sama/Kolaborasi Pelaksanaan	Apakah kegiatan dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak lain? ☐ ya ☐ peran PUJK dan pihak lain (PUJK) dalam kegiatan (maksimal 3): 1. <i>(nama PUJK pelapor)</i> 2. ... <i>(nama pihak 1)</i> ... <i>(deskripsi dari peran pihak 1),</i> 3. ... <i>(nama pihak 2)</i> ... <i>(deskripsi dari peran pihak 2),</i> 4. ... <i>(nama pihak 3)</i> ... <i>(deskripsi dari peran pihak 3).</i> ☐ peran PUJK dan pihak lain (di luar PUJK) dalam kegiatan: 1. <i>(nama PUJK pelapor)</i> 2. ... <i>(nama pihak 1)</i> ... <i>(deskripsi dari peran pihak 1),</i> 3. ... <i>(nama pihak 2)</i> ... <i>(deskripsi dari peran pihak 2),</i> 4. ... <i>(nama pihak 3)</i> ... <i>(deskripsi dari peran pihak 3).</i> dst... ☐ tidak
11.	Indikator Evaluasi	A. Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan ☐ kesesuaian bentuk pelaksanaan kegiatan ☐ kesesuaian sasaran ☐ kesesuaian jumlah target konsumen ☐ kesesuaian jadwal ☐ kesesuaian frekuensi ☐ kesesuaian wilayah ☐ lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(mandatory semua pilihan terisi)</i> B. Evaluasi Dampak Kegiatan Perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target Konsumen ☐ penambahan jaringan kantor ☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ penambahan saluran distribusi atau <i>delivery channel</i> produk dan/atau layanan ☐ penyediaan sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus ☐ ketersediaan program pemerintah atau otoritas ☐ lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) Penyediaan Produk dan/atau Layanan ☐ produk dan/atau layanan baru yang bersifat umum ☐ produk dan/atau layanan sederhana ☐ produk dan/atau layanan tematik ☐ melaksanakan program pemerintah atau otoritas ☐ lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) Keberlangsungan atas Produk dan/atau Layanan 1. Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ jumlah rekening tabungan/ kredit/ pembiayaan/ efek/ dana pensiun ☐ jumlah transaksi ☐ jumlah polis asuransi ☐ jumlah sertifikat penjaminan ☐ jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura ☐ jumlah transaksi gadai ☐ penambahan jumlah kepemilikan atas produk dan/atau layanan ☐ lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) 2. Peningkatan kualitas pengguna produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat ☐ jumlah konsumen tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan lainnya ☐ kemampuan konsumen untuk dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai ☐ penambahan jumlah konsumen dan/atau masyarakat, yang memiliki produk dan/atau layanan ☐ lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)
12.	Bentuk Evaluasi	☐ memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan

No.	Komponen	Rencana/Realisasi																		
		☐ memperhatikan data dan laporan dari periode - periode sebelumnya ☐ melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan perencanaan dan realisasi kegiatan ☐ menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan ☐ lainnya: ... (sebutkan) <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>																		
13	Hasil Evaluasi (Dilaporkan pada laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan)	<i>(secara sistem akan mengacu pada indikator evaluasi dan bentuk pelaksanaan dilengkapi dengan hasil evaluasi)</i> A. Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan ☐ kesesuaian bentuk pelaksanaan kegiatan ☐ kesesuaian sasaran ☐ kesesuaian jumlah target konsumen ☐ kesesuaian jadwal ☐ kesesuaian frekuensi ☐ kesesuaian wilayah ☐ lainnya: ... (sebutkan) <i>(mandatory semua pilihan terisi)</i> B. Evaluasi Dampak Kegiatan Perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target konsumen <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ penambahan jaringan kantor</td><td>... <i>(diisi dengan jumlah)</i></td><td>... <i>(diisi dengan jumlah)</i></td></tr> <tr> <td>☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain</td><td>... <i>(diisi dengan jumlah)</i></td><td>... <i>(diisi dengan jumlah)</i></td></tr> <tr> <td>☐ penambahan saluran distribusi atau <i>delivery channel</i> produk dan/atau layanan</td><td>... <i>(diisi dengan jumlah)</i></td><td>... <i>(diisi dengan jumlah)</i></td></tr> <tr> <td>☐ penambahan sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus</td><td>... <i>(diisi dengan jumlah)</i></td><td>... <i>(diisi dengan jumlah)</i></td></tr> <tr> <td>☐ dukungan pada program pemerintah atau otoritas</td><td>... <i>(program yang direncanakan)</i></td><td>... <i>(realisasi program)</i></td></tr> </tbody> </table>		Sebelum	Sesudah	☐ penambahan jaringan kantor	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	☐ penambahan saluran distribusi atau <i>delivery channel</i> produk dan/atau layanan	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	☐ penambahan sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	☐ dukungan pada program pemerintah atau otoritas	... <i>(program yang direncanakan)</i>	... <i>(realisasi program)</i>
	Sebelum	Sesudah																		
☐ penambahan jaringan kantor	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>																		
☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>																		
☐ penambahan saluran distribusi atau <i>delivery channel</i> produk dan/atau layanan	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>																		
☐ penambahan sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>																		
☐ dukungan pada program pemerintah atau otoritas	... <i>(program yang direncanakan)</i>	... <i>(realisasi program)</i>																		

No.	Komponen	Rencana/Realisasi		
		☐ lainnya: ... (sebutkan)	... (diisi dengan jumlah/present ase)	... (diisi dengan jumlah/presenta se)
		(dapat diisi lebih dari satu)		
		Penyediaan produk dan/atau layanan		
			Sebelum	Sesudah
		☐ jumlah produk dan/atau layanan yang bersifat umum	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)
		☐ jumlah produk dan/atau layanan sederhana	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)
		☐ jumlah produk dan/atau layanan tematik	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)
		☐ melaksanakan program pemerintah atau otoritas	... (program yang dilaksanakan)	... (realisasi program yang dilaksanakan)
		☐ lainnya: ... (sebutkan)	... (diisi dengan jumlah/presentase)	... (diisi dengan jumlah/presentase)
		(dapat diisi lebih dari satu)		
		Keberlangsungan atas produk dan/atau layanan		
		1. Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan		
		☐ jumlah rekening tabungan/kredit/pembiayaan/efek/ dana pensiun	Sebelum	Sesudah
			... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)
		☐ jumlah transaksi	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)
		☐ jumlah polis asuransi	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)
		☐ jumlah sertifikat penjaminan	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)
		☐ jumlah pasangan usaha	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)

No.	Komponen	Rencana/Realisasi		
		dan/atau debitur modal ventura		
		☐ jumlah transaksi gadai	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)
		☐ penambahan jumlah kepemilikan atas produk dan/atau layanan	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)
		☐ lainnya: ... (sebutkan)	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)
		(dapat diisi lebih dari satu)		
		2. Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat		
			Sebelum	Sesudah
		☐ jumlah konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)
		☐ kemampuan konsumen untuk dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan serta	... (diisi dengan kondisi)	... (diisi dengan kondisi)

No.	Komponen	Rencana/Realisasi		
		dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/ penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai		
		☐ penambahan jumlah konsumen dan/atau masyarakat, yang memiliki produk dan/atau layanan	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)
		☐ lainnya: ... (sebutkan)	... (diisi dengan jumlah/ kondisi)	... (diisi dengan jumlah/ kondisi)
		(dapat diisi lebih dari satu)		
		Kesesuaian realisasi dengan perencanaan terkait dengan: ☐ kesesuaian bentuk pelaksanaan kegiatan ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi bentuk pelaksanaan kegiatan ... (deskripsi) ☐ kesesuaian sasaran ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi sasaran ... (deskripsi) ☐ kesesuaian jumlah target konsumen ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi jumlah target konsumen... (deskripsi) ☐ kesesuaian jadwal ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi jadwal... (deskripsi) ☐ kesesuaian frekuensi ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi frekuensi... (deskripsi)		

No.	Komponen	Rencana/Realisasi
		☐ kesesuaian wilayah ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi wilayah... (deskripsi) (dapat diisi lebih dari satu)
14	Dokumentasi (Dilaporkan pada laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan)	... (diisi dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan)

II. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA KEGIATAN

A. Penyusunan Laporan Rencana Kegiatan Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan

PUJK wajib menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan, yang paling sedikit memuat:

1. Nama Kegiatan

PUJK mengisi komponen nama kegiatan dengan nama kegiatan yang menggambarkan aktivitas.

No.	Komponen	Rencana
1.	Nama Kegiatan	

2. Kategori Kegiatan

PUJK mengisi komponen kategori kegiatan dengan memilih jenis kategori kegiatan yang sesuai.

No.	Komponen	Rencana
2.	Kategori Kegiatan	☐ Konvensional ☐ Syariah

3. Tujuan kegiatan

PUJK mengisi komponen tujuan kegiatan dengan hal/kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan oleh PUJK.

No.	Komponen	Rencana
3.	Tujuan Kegiatan	

4. Cakupan Kegiatan

PUJK mengisi komponen cakupan kegiatan dengan memilih cakupan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat.

No.	Komponen	Rencana
4.	Cakupan Kegiatan	☐ Edukasi Keuangan ☐ pengembangan sarana dan prasarana

5. Bentuk Pelaksanaan

Komponen berisi bentuk pelaksanaan berdasarkan cakupan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan baik untuk cakupan kegiatan Edukasi Keuangan maupun pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

No.	Komponen	Rencana
5.	Bentuk Pelaksanaan	☐ Edukasi Keuangan ☐ sosialisasi ☐ lokakarya (<i>workshop</i>) ☐ pendampingan ☐ pelatihan komunitas (<i>training of community/ToC</i>) ☐ program penjangkauan (<i>outreach program</i>)

	☐ permainan (<i>gamification</i>) ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) Apakah PUJK menyampaikan simulasi pada kegiatan Edukasi Keuangan? ☐ ya ☐ tidak ☐ Pengembangan Sarana dan Prasarana 1. Pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan: ☐ pembelajaran elektronik (<i>e-learning</i>) ... (<i>sebutkan pembangunan/pengembangan yang dilakukan</i>) ☐ situs web (<i>website</i>) ... (<i>sebutkan pembangunan/pengembangan yang dilakukan</i>) ☐ aplikasi seluler (<i>mobile application</i>) ... (<i>sebutkan pembangunan/pengembangan yang dilakukan</i>) ☐ pembuatan media sosial/akun media sosial ... (<i>sebutkan pembangunan/pengembangan yang dilakukan</i>) ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) 2. Penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat: ☐ buku seri Literasi Keuangan untuk pendidikan formal ☐ buku saku pengelolaan keuangan ☐ buku Literasi Keuangan untuk komunitas ☐ majalah edukasi konsumen ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) 3. Penyediaan sumber daya manusia ☐ perekrutan sumber daya manusia yang kompeten untuk pelaksanaan kegiatan Edukasi Keuangan ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>)
--	--

		4. Pelatihan sumber daya manusia ☐ pelatihan untuk pelatih (<i>training of trainer/ToT</i>) ☐ pelatihan untuk fasilitator (<i>training of facilitator/ToF</i>) ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) 5. Penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan (<i>dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta</i>) ☐ selebaran ☐ brosur ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) (beri tanda pada salah satu pilihan)
--	--	---

6. Metode Pelaksanaan
- Komponen ini berisi metode pelaksanaan yang akan diterapkan oleh PUJK dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. Metode pelaksanaan dilakukan berdasarkan masing-masing ruang lingkup, sebagai berikut:
- 1) Edukasi Keuangan

Metode pelaksanaan untuk kegiatan Edukasi Keuangan dapat dilaksanakan dengan:

a) Tatap muka

Pelaksanaan secara tatap muka memerlukan kehadiran fisik.

b) Tanpa tatap muka.

Pelaksanaan tanpa tatap muka dapat dilakukan dengan:

1) platform pertemuan secara daring (*online meeting platform*);

2) media sosial dengan kegiatan secara langsung (*live*).

c) Tatap muka dan tanpa tatap muka (*hybrid*)

Pelaksanaan dengan mekanisme tatap muka dan tanpa tatap muka secara bersamaan.

2) Pengembangan sarana dan prasarana

a) pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan dapat dilaksanakan dengan pembangunan atau pengembangan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik (contoh: digital, media massa)

b) penyediaan materi Edukasi Keuangan dapat dilaksanakan dalam wujud cetak (dipublikasikan secara fisik) atau noncetak (dipublikasikan secara digital).

c) penyediaan dan/atau pelatihan sumber daya manusia dapat dilakukan secara tatap muka dan tanpa tatap muka. Untuk penyediaan sumber daya manusia, metode pelaksanaan yang digunakan yaitu pada saat proses perekrutan sumber daya manusia.
- <https://jdih.ojk.go.id/>

Penyediaan dan/atau pelatihan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui proses rekrutmen langsung, melalui pihak ketiga, dan lainnya.

- 3) Informasi karakteristik produk dan/atau layanan (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta) dapat dilaksanakan dalam wujud cetak (dipublikasikan secara fisik) atau noncetak (dipublikasikan secara digital).

No.	Komponen	Rencana
6.	Metode Pelaksanaan	☐ Edukasi Keuangan ☐ tatap muka (memerlukan kehadiran fisik)☐ tanpa tatap muka, dilakukan dengan: ☐ platform pertemuan secara daring (<i>online meeting platform</i>)☐ media sosial dengan kegiatan secara langsung (<i>live</i>)☐ media lainnya dengan kegiatan secara langsung (<i>live</i>) ... (<i>sebutkan</i>) ☐ tatap muka dan tanpa tatap muka (<i>hybrid</i>) (<i>beri tanda pada salah satu pilihan</i>) ☐ Pengembangan Sarana dan Prasarana ☐ pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan: ☐ fisik, berupa ... (<i>sebutkan</i>)☐ non fisik (digital, media massa), berupa ... (<i>sebutkan</i>) ☐ penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat: ☐ dipublikasikan secara cetak☐ dipublikasikan secara noncetak ☐ penyediaan sumber daya manusia ☐ proses rekrutmen langsung☐ melalui pihak ketiga☐ lainnya (<i>sebutkan</i>) ☐ pelatihan sumber daya manusia

Dalam hal PUJK memiliki produk dan/atau layanan digital, materi Edukasi Keuangan termasuk mengenai produk dan/atau layanan digital antara lain:

- 1) pengetahuan mengenai produk dan/atau layanan keuangan digital;
 - 2) penggunaan produk dan/atau layanan keuangan digital secara bijak;
 - 3) kesadaran risiko keuangan digital dan cara memitigasinya;
 - 4) memahami hak, kewajiban, dan prosedur untuk melakukan pengaduan;
 - 5) modus kejahatan keuangan berbasis digital dan cara menghindarinya; dan
 - 6) kesadaran atas perlindungan data pribadi.
- b. sarana dan prasarana diatur sebagai berikut:

Dalam hal PUJK melakukan pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan atau penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat, materi minimal mencakup:

- 1) karakteristik sektor jasa keuangan;
- 2) karakteristik produk dan/atau layanan, yang terdiri atas:
 - a) deskripsi;
 - b) manfaat;
 - c) risiko;
 - d) biaya;
 - e) hak dan kewajiban;
 - f) cara mengakses; dan
 - g) penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- 3) pengelolaan keuangan; dan
- 4) perpajakan terkait produk dan/atau layanan.

Dalam hal PUJK melakukan penyediaan dan/atau pelatihan sumber daya manusia:

- 1) penyediaan sumber daya manusia
PUJK mengisi keahlian sumber daya manusia yang direkrut.
- 2) pelatihan sumber daya manusia
PUJK mengisi materi yang disampaikan pada saat pelatihan, dengan memilih:
 - a) karakteristik sektor jasa keuangan;
 - b) karakteristik produk dan/atau layanan, yang terdiri atas:
 - (1) deskripsi;
 - (2) manfaat;
 - (3) risiko;
 - (4) biaya;
 - (5) hak dan kewajiban;
 - (6) cara mengakses; dan
 - (7) penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - c) pengelolaan keuangan; dan
 - d) perpajakan terkait produk dan/atau layanan.

Khusus Perusahaan Pergadaian Swasta, pemenuhan kewajiban peningkatan Literasi Keuangan melalui pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses karakteristik produk dan/atau layanan serta penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan, terdiri atas:

- 1) deskripsi;
- 2) manfaat;
- 3) risiko;
- 4) biaya;
- 5) cara mengakses; dan
- 6) penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.

No.	Komponen	Rencana
7.	Materi	A. Edukasi Keuangan Materi Edukasi Keuangan ☐ Karakteristik Sektor Jasa Keuangan ☐ sektor perbankan ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor perbankan ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun ☐ peran dan fungsi

		☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto secara umum baik konvensional
--	--	---

		maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ Karakteristik Produk dan/atau Layanan ☐ deskripsi ☐ manfaat ☐ risiko ☐ biaya ☐ hak dan kewajiban ☐ cara mengakses ☐ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa ☐ lainnya: (sebutkan) ☐ Pengelolaan Keuangan ☐ perencanaan keuangan untuk masa depan ☐ identifikasi kesehatan keuangan, termasuk pengelolaan utang dan penyediaan dana darurat ☐ tahapan dalam pengelolaan keuangan ☐ pencatatan aset/harta yang dimiliki ☐ pencatatan pemasukan dan pengeluaran (<i>budgeting</i>), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/nonrutin bulanan/tahunan ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ Perpajakan ☐ Perpajakan terkait produk dan/atau layanan ☐ lainnya: (sebutkan) ☐ Materi Edukasi Keuangan digital (bagi PUJK yang memiliki produk dan/atau layanan digital) ☐ pengetahuan mengenai produk dan/atau layanan keuangan digital; ☐ penggunaan produk dan/atau layanan
--	--	---

		keuangan digital secara bijak; ☐ kesadaran risiko keuangan digital dan cara memitigasinya; ☐ memahami hak, kewajiban, dan prosedur untuk melakukan pengaduan; ☐ modus kejahatan keuangan berbasis digital dan cara menghindarinya; dan ☐ kesadaran atas perlindungan data pribadi. ☐ lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> B. Pengembangan sarana dan prasarana 1. Pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan Materi Edukasi Keuangan ☐ Karakteristik Sektor Jasa Keuangan ☐ sektor perbankan ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor perbankan ☐ lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon secara umum baik konvensional
--	--	---

		maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto
--	--	---

		☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ Karakteristik Produk dan/atau Layanan ☐ deskripsi ☐ manfaat ☐ risiko ☐ biaya ☐ hak dan kewajiban ☐ cara mengakses ☐ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa ☐ lainnya: (<i>sebutkan</i>) ☐ Pengelolaan Keuangan ☐ perencanaan keuangan untuk masa depan ☐ identifikasi kesehatan keuangan, termasuk pengelolaan utang dan penyediaan dana darurat ☐ tujuan pengelolaan keuangan ☐ tahapan dalam pengelolaan keuangan ☐ pencatatan aset/harta yang dimiliki ☐ pencatatan pemasukan dan pengeluaran (<i>budgeting</i>), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan
--	--	--

		pengeluaran rutin/nonrutin bulanan/tahunan ☐ lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ Perpajakan terkait produk dan/atau layanan ☐ perpajakan terkait produk dan/atau layanan ☐ lainnya.... <i>(sebutkan)</i> ☐ Materi Edukasi Keuangan digital ☐ pengetahuan mengenai produk dan/atau layanan keuangan digital; ☐ penggunaan produk dan/atau layanan keuangan digital secara bijak; ☐ kesadaran risiko keuangan digital dan cara memitigasinya; ☐ memahami hak, kewajiban, dan prosedur untuk melakukan pengaduan; ☐ modus kejahatan keuangan berbasis digital dan cara menghindarinya; dan ☐ kesadaran atas perlindungan data pribadi ☐ lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> 2. Penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat Materi Edukasi Keuangan ☐ Karakteristik Sektor Jasa Keuangan ☐ sektor perbankan ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah
--	--	--

		☐ pelaku di sektor perbankan ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan
--	--	---

		LJK Lainnya secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ Karakteristik Produk dan/atau Layanan ☐ deskripsi ☐ manfaat ☐ risiko ☐ biaya ☐ hak dan kewajiban ☐ cara mengakses ☐ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa ☐ lainnya: (<i>sebutkan</i>) ☐ Pengelolaan Keuangan ☐ perencanaan keuangan untuk masa depan ☐ identifikasi kesehatan keuangan termasuk pengelolaan utang
--	--	---

		dan penyediaan dana darurat ☐ tujuan pengelolaan keuangan ☐ tahapan dalam pengelolaan keuangan ☐ pencatatan aset/harta yang dimiliki ☐ pencatatan pemasukan dan pengeluaran (<i>budgeting</i>), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/nonrutin bulanan/tahunan ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ Perpajakan terkait produk dan/atau layanan ☐ perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ lainnya (<i>sebutkan</i>) ☐ Materi Edukasi Keuangan digital ☐ pengetahuan mengenai produk dan/atau layanan keuangan digital; ☐ penggunaan produk dan/atau layanan keuangan digital secara bijak; ☐ kesadaran risiko keuangan digital dan cara memitigasinya; ☐ memahami hak, kewajiban, dan prosedur untuk melakukan pengaduan; ☐ modus kejahatan keuangan berbasis digital dan cara menghindarinya; dan ☐ kesadaran atas perlindungan data pribadi
--	--	--

		berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah ☐ pelaku di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya ☐ peran dan fungsi ☐ kelembagaan ☐ produk dan/atau layanan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan
--	--	---

		mikro, dan LJK Lainnya secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya □ lainnya: ... (sebutkan) □ sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto □ peran dan fungsi □ kelembagaan □ produk dan/atau layanan sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah □ pelaku di inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto □ lainnya: ... (sebutkan) □ Karakteristik Produk dan/atau Layanan
--	--	---

		☐ deskripsi ☐ manfaat ☐ risiko ☐ biaya ☐ hak dan kewajiban ☐ cara mengakses ☐ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa ☐ lainnya: (sebutkan) ☐ Pengelolaan Keuangan ☐ perencanaan keuangan untuk masa depan ☐ identifikasi kesehatan, keuangan termasuk pengelolaan utang dan penyediaan dana darurat ☐ tujuan pengelolaan keuangan ☐ tahapan dalam pengelolaan keuangan ☐ pencatatan aset/harta yang dimiliki ☐ pencatatan pemasukan dan pengeluaran (budgeting), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/nonrutin bulanan/tahunan ☐ lainnya: ... (sebutkan) ☐ Perpajakan terkait produk dan/atau layanan ☐ perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ lainnya..... (sebutkan)
--	--	--

		C. Penyediaan Informasi Karakteristik Produk dan/atau Layanan (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta) ☐ deskripsi ☐ manfaat ☐ risiko ☐ biaya ☐ cara mengakses ☐ penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa
--	--	---

8. Sasaran dan/atau Jumlah Peserta

a. Sasaran Peserta

Komponen sasaran peserta berisi jenis kelompok peserta yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. Sasaran peserta dalam suatu kegiatan dapat terdiri lebih dari satu kelompok peserta. Kelompok peserta juga dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin tertentu. Apabila memilih lebih dari satu kelompok sasaran peserta, maka PUJK mengisi jumlah peserta pada masing-masing kelompok sasaran peserta yang dipilih. Jika PUJK tidak memiliki sasaran kelompok tertentu maka dapat memilih “Masyarakat Umum”.

b. Jumlah Peserta

Untuk pengisian laporan rencana Literasi Keuangan, komponen jumlah peserta berisi rencana/prakiraan jumlah:

- 1) peserta yang akan mengikuti kegiatan Edukasi Keuangan untuk PUJK yang melakukan kegiatan Edukasi Keuangan;
- 2) peserta atau yang akan melakukan klik/*view*/unduh oleh masyarakat umum untuk PUJK yang melakukan:
 - a) pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan;
 - b) penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat; atau
 - c) penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta).
Perusahaan Pergadaian Swasta yang melakukan penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan berbentuk *banner*, spanduk, dan/atau *videotron* menyusun formulasi penghitungan *view* yang akan digunakan pada saat penghitungan rencana dan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
- 3) peserta yang mengikuti pelatihan untuk pelatih atau pelatihan untuk fasilitator bagi PUJK yang melakukan pelatihan sumber daya manusia; atau

4) peserta yang akan direkrut untuk PUJK yang melakukan penyediaan sumber daya manusia.

Kolom jumlah peserta dapat diisi berdasarkan sasaran peserta yang dipilih.

PUJK yang melakukan kegiatan Edukasi Keuangan, melakukan pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan atau penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat, PUJK mengisi kolom sasaran dan jumlah peserta.

PUJK yang melakukan penyediaan dan/atau pelatihan sumber daya manusia mengisi kolom jumlah peserta.

No.	Komponen	Rencana	
8.	Sasaran dan/atau Jumlah Peserta	Sasaran Peserta	Jumlah Peserta
		Jenis Kelamin ☐ laki-laki ☐ perempuan ☐ tidak ditentukan <i>(dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan)</i> Keterangan: <i>Pilihan “tidak ditentukan” jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan untuk jenis kelamin tertentu.</i>	... peserta/ <i>click/view/</i> unduh ... peserta/ <i>click/view/</i> unduh ... peserta/ <i>click/view/</i> unduh
		Usia ☐ dibawah 15 tahun ☐ 15-17 tahun ☐ 18-25 tahun ☐ 26-35 tahun ☐ 36-50 tahun ☐ 51-79 tahun ☐ di atas 79 tahun ☐ Tidak ditentukan <i>(dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan)</i> Keterangan: <i>Pilihan “tidak</i>	... peserta/ <i>click/view/</i> unduh ... peserta/ <i>click/view/</i> unduh ... peserta/ <i>click/view/</i> unduh ... peserta/ <i>click/view/</i> unduh ... peserta/ <i>click/view/</i> unduh ... peserta/ <i>click/view/</i> unduh ... peserta/ <i>click/view/</i> unduh ... peserta/ <i>click/view/</i> unduh ... peserta/ <i>click/view/</i> unduh ... peserta/ <i>click/view/</i> unduh

		<i>ditentukan” jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan untuk usia tertentu.</i>	
		Sasaran Peserta	Jumlah Peserta
		☐ pekerja informal	... peserta/ <i>click/ view/ unduh</i>
		☐ petani	... peserta/ <i>click/ view/ unduh</i>
		☐ nelayan	... peserta/ <i>click/ view/ unduh</i>
		☐ guru	... peserta/ <i>click/ view/ unduh</i>
		☐ dosen	... peserta/ <i>click/ view/ unduh</i>
		☐ penyuluh	... peserta/ <i>click/ view/ unduh</i>
		☐ profesional: ... (sebutkan)	... peserta/ <i>click/ view/ unduh</i>
		☐ karyawan	... peserta/ <i>click/ view/ unduh</i>
		☐ UMKM / pedagang	... peserta/ <i>click/ view/ unduh</i>
		☐ Ibu rumah tangga	... peserta/ <i>click/ view/ unduh</i>
		☐ pelajar	... peserta/ <i>click/ view/ unduh</i>
		☐ mahasiswa	... peserta/ <i>click/ view/ unduh</i>
		☐ pemuda	... peserta/ <i>click/ view/ unduh</i>
		☐ pensiunan	... peserta/ <i>click/ view/ unduh</i>
		☐ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	... peserta/ <i>click/ view/ unduh</i>
		☐ calon Pekerja Migran Indonesia (calon PMI)	... peserta/ <i>click/ view/ unduh</i>
		☐ Keluarga Pekerja Migran Indonesia (KPMI)	... peserta/ <i>click/ view/ unduh</i>
		☐ penyandang disabilitas	... peserta/ <i>click/ view/ unduh</i>

		☐ Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): ... (sebutkan)	... peserta/ <i>click/view</i> / unduh
		☐ masyarakat daerah tertinggal, terdalam, dan terluar	... peserta/ <i>click/view</i> / unduh
		☐ komunitas: ... (sebutkan)	... peserta/ <i>click/view</i> / unduh
		☐ masyarakat umum	... peserta/ <i>click/view</i> / unduh
		☐ lainnya: ... (sebutkan)	... peserta/ <i>click/view</i> / unduh

9. Jadwal dan/atau Wilayah

a. Jadwal

Komponen jadwal berisi rencana/prakiraan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang dilaksanakan oleh PUJK. PUJK yang melakukan penyediaan sumber daya manusia mengisi kolom jadwal merupakan jadwal perekrutan sumber daya manusia.

Jadwal pelaksanaan diisi dengan rencana tanggal dan/atau bulan pelaksanaan kegiatan.

b. Wilayah

Komponen wilayah berisi keterangan wilayah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang dilaksanakan oleh PUJK. PUJK dapat memilih lebih dari satu wilayah untuk pilihan selain “Luar Negeri” dan “Tidak Ditentukan”. Selanjutnya, PUJK dapat mengisi kota/kabupaten pelaksanaan kegiatan apabila sebelumnya mengisi opsi provinsi-provinsi di Indonesia.

PUJK yang melakukan:

- kegiatan Edukasi Keuangan;
- pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan fisik;
- penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat berbentuk cetak;
- pelatihan sumber daya manusia; atau
- Penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta) berbentuk cetak,

mengisi kolom jadwal dan wilayah.

PUJK yang melakukan:

- kegiatan Edukasi Keuangan dengan metode pelaksanaan tanpa tatap muka; atau

b. melakukan pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan atau penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat digital,

dapat mengisi kolom wilayah dengan pilihan “tidak ditentukan”.

PUJK yang melakukan pembangunan atau pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan, penyediaan materi Edukasi Keuangan berbentuk noncetak yang dapat diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat atau penyediaan sumber daya manusia mengisi kolom jadwal dan wilayah.

Penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta) berbentuk noncetak mengisi kolom jadwal dan wilayah.

No.	Komponen	Rencana
9.	Jadwal	Dimulai ... selesai ...
10.	Wilayah	Wilayah ☐ Perdesaan ☐ Perkotaan ☐ tidak ditentukan <i>(dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan)</i> Keterangan Pilihan “tidak ditentukan” jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan untuk desa/kota tertentu. Provinsi ☐ Aceh, kabupaten/kota ... ☐ Bali, kabupaten/kota ... ☐ Banten, kabupaten/kota ... ☐ Bengkulu, kabupaten/kota ... ☐ Gorontalo, kabupaten/kota ... ☐ DKI Jakarta, kabupaten/kota ... ☐ Jambi, kabupaten/kota ... ☐ Jawa Barat, kabupaten/kota ... ☐ Jawa Tengah, kabupaten/kota ... ☐ Jawa Timur, kabupaten/kota ... ☐ Kalimantan Barat, kabupaten/kota ... ☐ Kalimantan Selatan, kabupaten/kota ...

		<i>Pilihan “Tidak ditentukan” jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan wilayah.</i>
--	--	--

10. Frekuensi Pelaksanaan
Komponen frekuensi pelaksanaan berisi jumlah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang dilaksanakan oleh PUJK.

No.	Komponen	Rencana
11.	Frekuensi Pelaksanaan	... kali pelaksanaan Keterangan: <i>Secara otomatis akan tertulis 1 (satu) kali. Apabila PUJK melakukan kegiatan lebih dari 1 (satu) kali maka mengisi pada form berikutnya.</i>

11. Sumber dan Jumlah Biaya
Komponen Sumber biaya berisi informasi atas asal muasal alokasi dana yang dianggarkan yang digunakan oleh PUJK untuk pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
Komponen Jumlah biaya berisi estimasi jumlah biaya yang digunakan oleh PUJK untuk pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

No.	Komponen	Rencana
12.	Sumber dan Jumlah Biaya	Sumber Biaya ☐ anggaran Literasi Keuangan ☐ anggaran tanggung jawab sosial perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>) ☐ anggaran lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) (<i>beri tanda pada salah satu pilihan</i>) Jumlah Biaya (dalam Rupiah) (<i>diisi dengan rencana jumlah biaya yang dialokasikan</i>)

12. Kerja Sama/Kolaborasi Pelaksanaan
PUJK dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. Pihak lain dimaksud antara lain otoritas, instansi pemerintah, asosiasi PUJK, PUJK lain, badan usaha, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, peneliti, dan/atau akademisi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Dalam hal kerja sama dilakukan dengan PUJK lain, PUJK dapat bekerja sama paling banyak dengan 3 (tiga) PUJK lain. Namun, pembatasan kerja sama tersebut dikecualikan untuk kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah atau otoritas.
Dalam hal PUJK melakukan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan bekerja sama dengan pihak lain, laporan

rencana dan realisasi memuat peran atau kontribusi PUJK lain dan pihak lain dimaksud. Peran atau kontribusi pihak lain tersebut dapat berupa antara lain penyediaan sumber daya manusia, dana, dan/atau tempat.

No.	Komponen	Rencana
13.	Kerja Sama/Kolaborasi Pelaksanaan	Apakah kegiatan dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak lain? ☐ ya ☐ peran PUJK dan pihak lain (PUJK) dalam kegiatan (maksimal 3): 1. (nama PUJK pelapor) 2. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1), 3. ... (nama pihak 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), 4. ... (nama pihak 3) ... (deskripsi dari peran pihak 3). ☐ peran PUJK dan pihak lain (di luar PUJK) dalam kegiatan: 1. ... (nama PUJK pelapor) 2. ... (nama pihak 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1), 3. ... (nama pihak 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), 4. ... (nama pihak 3) ... (deskripsi dari peran pihak 3). dst... ☐ tidak

13. Inisiator Kegiatan
- Bagian inisiator kegiatan berisi inisiator dari kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
- Contoh dari pemerintah: pemerintah pusat, pemerintah daerah.
- Contoh dari otoritas: Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia.

14.	Inisiator Kegiatan	Inisiator Kegiatan: ☐ Pemerintah/Otoritas ☐ PUJK
-----	--------------------	---

14. Indikator dan Bentuk Evaluasi
- a. Indikator Evaluasi
- Komponen indikator evaluasi berisi hal-hal yang menjadi ukuran/alat ukur untuk mengetahui atau menilai

kesesuaian pelaksanaan serta hasil/dampak (*outcome*) kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

Indikator Evaluasi berisikan:

- 1) Indikator evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan, antara lain kesesuaian realisasi dengan perencanaan terkait dengan bentuk pelaksanaan, metode pelaksanaan, materi/informasi karakteristik produk dan/atau layanan, sasaran peserta, jumlah peserta, waktu pelaksanaan, wilayah pelaksanaan, dan biaya yang dikeluarkan.
 - 2) Indikator evaluasi terhadap hasil/dampak kegiatan, antara lain:
 - a) tingkat pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan/atau perilaku;
 - b) ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c) kesesuaian fungsi sarana dan prasarana dengan tujuan pengembangan sarana dan prasarana dan/atau kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - d) kemampuan/keterampilan pelatih/fasilitator/sumber daya manusia dalam menyampaikan materi Edukasi Keuangan.
- b. Bentuk Evaluasi

Bagian Bentuk Evaluasi berisi cara untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan serta hasil/dampak (*outcome*) kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

Bentuk Evaluasi berisikan:

- 1) metode pengukuran evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan, antara lain menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan, dan/atau melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan.
- 2) metode pengukuran terhadap dampak kegiatan, antara lain membandingkan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (*pre-test* dan *post-test*), memperhatikan data dan laporan dari periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola, survei untuk mengetahui tingkat Literasi Keuangan perseorangan/kelompok tertentu, kuesioner, jajak pendapat, penilaian (*assessment*) untuk menguji pemahaman, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia yang direkrut, dan/atau pengujian (*pre-test* dan *post-test*) untuk menguji pemahaman, keterampilan dan kemampuan *trainer/facilitator* dalam melakukan penyampaian materi Edukasi Keuangan.
- 3) sarana pengukuran, antara lain pengukuran langsung atau pengukuran melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

No.	Komponen	Rencana
15.	Indikator Evaluasi	A. Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Edukasi Keuangan

		4. Penyediaan sumber daya manusia ☐ Kesesuaian rekrutmen sumber daya manusia dengan kebutuhan Edukasi Keuangan ☐ Lainnya:...(Sebutkan) (Dapat diisi lebih dari satu) 5. Pelatihan sumber daya manusia ☐ Kemampuan/keterampilan sumber daya manusia menyampaikan materi ☐ Kemampuan/keterampilan pelatih/fasilitator menyampaikan materi ☐ Lainnya:...(sebutkan) (Dapat diisi lebih dari satu)
16.	Bentuk Evaluasi	A. Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan 1. Metode Pengukuran ☐ menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan ☐ melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan ☐ lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) 2. Sarana Pengukuran ☐ pengukuran langsung ☐ pengukuran melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi B. Evaluasi Dampak Kegiatan ☐ Edukasi Keuangan 1. Metode Pengukuran ☐ membandingkan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan (<i>pre-test</i> dan <i>post-test</i>) ☐ survei untuk mengetahui tingkat pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku (Literasi

		Keuangan) perseorangan/kelompok tertentu ☐ kuesioner ☐ jajak pendapat ☐ lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) 2. Sarana Pengukuran ☐ pengukuran langsung ☐ pengukuran melalui perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi ☐ Pengembangan Sarana dan Prasarana ☐ pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan 1. Metode Pengukuran ☐ memperhatikan data dan laporan dari periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola ☐ kuesioner ☐ jajak pendapat ☐ lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) 2. Sarana Pengukuran ☐ pengukuran langsung ☐ pengukuran melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi ☐ penyediaan materi Edukasi Keuangan 1. Metode Pengukuran ☐ memperhatikan data dan laporan dari periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola ☐ kuesioner ☐ jajak pendapat ☐ lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) 2. Sarana Pengukuran ☐ pengukuran langsung ☐ pengukuran melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi ☐ penyediaan dan/atau pelatihan Sumber Daya Manusia 1. Metode Pengukuran ☐ penilaian (<i>assessment</i>) untuk menguji
--	--	---

		pemahaman, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia yang direkrut □ pengujian (<i>pre-test</i> dan <i>post-test</i>) untuk menguji pemahaman, keterampilan dan kemampuan <i>trainer</i>/fasilitator dalam melakukan penyampaian materi Edukasi Keuangan □ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) (<i>dapat diisi lebih dari satu</i>) 2. Sarana Pengukuran □ pengukuran langsung □ pengukuran melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi □ Penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan yang diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat (dilakukan khusus oleh Perusahaan Pergadaian Swasta) 1. Metode Pengukuran □ memperhatikan data dan laporan dari periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola □ kuesioner □ jajak pendapat □ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) (<i>dapat diisi lebih dari satu</i>) 2. Sarana Pengukuran □ pengukuran langsung □ pengukuran melalui perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi
--	--	---

B. Penyusunan Laporan Rencana Kegiatan Untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan

PUJK wajib menyusun rencana untuk meningkatkan Inklusi Keuangan, yang paling sedikit memuat:

1. Nama Kegiatan

- a. PUJK mengisi komponen nama kegiatan dengan nama program yang menggambarkan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan

No.	Komponen	Rencana
1.	Nama Kegiatan	...

2. Kategori Kegiatan

PUJK mengisi komponen kategori kegiatan dengan memilih jenis kategori kegiatan yang sesuai.

No.	Komponen	Rencana
2.	Kategori Kegiatan	☐ konvensional ☐ syariah

3. Tujuan Kegiatan

PUJK mengisi komponen tujuan kegiatan dengan hal/kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan oleh PUJK.

No.	Komponen	Rencana
3.	Tujuan Kegiatan	

4. Cakupan Kegiatan

PUJK mengisi komponen cakupan kegiatan dengan memilih cakupan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai peningkatan Literasi dan Inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat.

No.	Komponen	Rencana
4.	Cakupan Kegiatan	☐ perluasan akses ☐ penyediaan Produk dan/atau Layanan ☐ keberlangsungan a. akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan; dan/atau b. produk dan/atau layanan, yang telah dimiliki atau disediakan oleh PUJK untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau masyarakat.

5. Bentuk Pelaksanaan
- Komponen ini berisi bentuk pelaksanaan berdasarkan ruang lingkup kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan, yang meliputi:
- 1) perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target konsumen;
 - 2) penyediaan produk dan/atau layanan; dan/atau
 - 3) keberlangsungan:
 - a) akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan; dan/atau
 - b) produk dan/atau layanan, yang telah dimiliki atau disediakan oleh PUJK untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau masyarakat.

No.	Komponen	Rencana
5.	Bentuk Pelaksanaan	☐ fisik ☐ digital (beri tanda pada salah satu pilihan) Perluasan Akses Terhadap Lembaga, Produk, dan/atau Layanan Kepada Target Konsumen ☐ penambahan jaringan kantor ☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain: ... (sebutkan) ☐ penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan: ... (sebutkan) ☐ penyediaan sarana khusus kepada konsumen dan/atau masyarakat penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia: ... (sebutkan) ☐ dukungan terhadap program pemerintah atau otoritas ☐ penambahan jaringan kantor ☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain: ... (sebutkan) ☐ penambahan saluran distribusi produk dan/atau layanan: ... (sebutkan) ☐ penyediaan sarana khusus kepada konsumen dan/atau masyarakat penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia: ... (sebutkan) ☐ lainnya: (sebutkan) ☐ lainnya:.... (sebutkan) (beri tanda pada salah satu pilihan) Penyediaan Produk dan/atau Layanan ☐ <u>penciptaan produk dan/layanan baru:</u> ☐ produk dan/atau layanan bersifat umum:... (sebutkan) ☐ produk dan/atau layanan sederhana: (sebutkan) ☐ produk dan/atau layanan tematik:.... (sebutkan)

	☐ pelaksanaan program pemerintah atau otoritas ☐ produk dan/atau layanan bersifat umum:... <i>(sebutkan)</i> ☐ produk dan/atau layanan sederhana: <i>(sebutkan)</i> ☐ produk dan/atau layanan tematik:.... <i>(sebutkan)</i> ☐ <u>pengembangan produk dan/atau layanan:</u> ☐ produk dan/atau layanan bersifat umum: <i>(penjelasan atas pengembangan yang dilakukan)</i> ☐ produk dan/atau layanan sederhana: <i>(penjelasan atas pengembangan yang dilakukan)</i> ☐ produk dan/atau layanan tematik:.... <i>(penjelasan atas pengembangan yang dilakukan)</i> ☐ pelaksanaan program pemerintah atau otoritas ☐ produk dan/atau layanan bersifat umum: <i>(penjelasan atas pengembangan yang dilakukan)</i> ☐ produk dan/atau layanan sederhana: <i>(penjelasan atas pengembangan yang dilakukan)</i> ☐ produk dan/atau layanan tematik:.... <i>(penjelasan atas pengembangan yang dilakukan)</i> <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i> Keberlangsungan atas Akses dan/atau Produk dan/atau Layanan ☐ keberlangsungan atas akses <i>(jelaskan metode yang dilakukan dalam menjaga keberlangsungan)</i> ☐ jaringan kantor: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ kerja sama dengan pihak lain: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ saluran distribusi produk dan/atau layanan: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ sarana khusus bagi konsumen dan/atau masyarakat penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ lainnya:.... <i>(sebutkan)</i> <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i> ☐ keberlangsungan atas produk dan/atau layanan ☐ penambahan jumlah konsumen dan/atau masyarakat yang memiliki produk dan/atau layanan ☐ penambahan jumlah kepemilikan atas produk dan/atau layanan
--	--

		(beri tanda pada salah satu pilihan)
--	--	--------------------------------------

6. Sasaran Kegiatan dan Jumlah Target Konsumen
- a. Sasaran Kegiatan
- Komponen ini berisi kelompok atau segmen masyarakat tertentu yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.
- Sasaran peserta dalam suatu kegiatan dapat terdiri lebih dari satu kelompok peserta. Kelompok peserta juga dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin tertentu. Apabila memilih lebih dari satu kelompok sasaran peserta, maka PUJK mengisi jumlah peserta pada masing-masing kelompok sasaran peserta yang dipilih. Jika PUJK tidak memiliki sasaran kelompok tertentu maka dapat memilih “Masyarakat Umum”.
- b. Jumlah Target Konsumen
- Bagian ini berisi jumlah target pengguna produk dan/atau layanan oleh PUJK dalam kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

No.	Komponen	Rencana	
6.	Sasaran Kegiatan dan Jumlah Target Konsumen	Sasaran Kegiatan	Jumlah Target Konsumen
		Jenis Kelamin ☐ laki-laki ☐ perempuan ☐ tidak ditentukan keterangan: Pilihan “tidak ditentukan” jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan untuk jenis kelamin tertentu. Usia ☐ dibawah 15 tahun ☐ 15-17 tahun ☐ 18-25 tahun ☐ 26-35 tahun ☐ 36-50 tahun ☐ 51-79 tahun ☐ di atas 79 tahun ☐ tidak ditentukan	☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen)

		(dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan) Keterangan: Pilihan “tidak ditentukan” jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan untuk usia tertentu. Sasaran Peserta ☐ pekerja informal ☐ petani ☐ nelayan ☐ institusi pendidikan ☐ profesional ☐ karyawan ☐ UMKM / pedagang ☐ rumah tangga ☐ pelajar ☐ mahasiswa ☐ pemuda ☐ pensiunan ☐ Pekerja Migran Indonesia (PMI) ☐ calon Pekerja Migran Indonesia (calon PMI) ☐ Keluarga Pekerja Migran Indonesia (KPMI) ☐ penyandang disabilitas ☐ Kelompok Masyarakat	Jumlah Peserta ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen) ☐ (jumlah target konsumen)
--	--	--	--

		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): ... <i>(sebutkan)</i> ☐ masyarakat daerah tertinggal, terdalam, dan terluar ☐ komunitas: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ masyarakat umum ☐ lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(beri tanda pada salah satu pilihan)</i>	☐ <i>(jumlah target konsumen)</i> ☐ <i>(jumlah target konsumen)</i> ☐ <i>(jumlah target konsumen)</i> ☐ <i>(jumlah target konsumen)</i>
--	--	---	---

7. Jadwal dan Wilayah

Komponen Jadwal berisi keterangan waktu atau periode pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. Komponen Wilayah berisi keterangan lokasi pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.

No.	Komponen	Rencana
7.	Jadwal	Dimulai ... Selesai ... <i>(diisi dengan rencana tanggal dan/atau bulan pelaksanaan)</i>
8.	Wilayah	Wilayah ☐ perdesaan ☐ perkotaan ☐ tidak ditentukan <i>(dapat memilih lebih dari satu untuk opsi selain tidak ditentukan)</i> Keterangan Pilihan “tidak ditentukan” jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan untuk desa/kota tertentu. Provinsi ☐ Aceh, kabupaten/kota ... ☐ Bali, kabupaten/kota ... ☐ Banten, kabupaten/kota ... ☐ Bengkulu, kabupaten/kota ... ☐ Gorontalo, kabupaten/kota ... ☐ DKI Jakarta, kabupaten/kota ... ☐ Jambi, kabupaten/kota ... ☐ Jawa Barat, kabupaten/kota ... ☐ Jawa Tengah, kabupaten/kota ...

	☐ Jawa Timur, kabupaten/kota ... ☐ Kalimantan Barat, kabupaten/kota ... ☐ Kalimantan Selatan, kabupaten/kota ... ☐ Kalimantan Tengah, kabupaten/kota ... ☐ Kalimantan Timur, kabupaten/kota ... ☐ Kalimantan Utara, kabupaten/kota ... ☐ Kepulauan Bangka Belitung, kabupaten/kota ... ☐ Kepulauan Riau, kabupaten/kota ... ☐ Lampung, kabupaten/kota ... ☐ Maluku, kabupaten/kota ... ☐ Maluku Utara, kabupaten/kota ... ☐ Nusa Tenggara Barat, kabupaten/kota ... ☐ Nusa Tenggara Timur, kabupaten/kota ... ☐ Papua, kabupaten/kota ... ☐ Papua Barat, kabupaten/kota ... ☐ Papua Barat Daya, kabupaten/kota ... ☐ Papua Selatan, kabupaten/kota ... ☐ Papua Tengah, kabupaten/kota ... ☐ Papua Pegunungan, kabupaten/kota ... ☐ Riau, kabupaten/kota ... ☐ Sulawesi Barat, kabupaten/kota ... ☐ Sulawesi Selatan, kabupaten/kota ... ☐ Sulawesi Tengah, kabupaten/kota ... ☐ Sulawesi Tenggara, kabupaten/kota ... ☐ Sulawesi Utara, kabupaten/kota ... ☐ Sumatera Barat, kabupaten/kota ... ☐ Sumatera Selatan, kabupaten/kota ... ☐ Sumatera Utara, kabupaten/kota ... ☐ DI Yogyakarta, kabupaten/kota ... ☐ Luar Negeri, sebutkan ... <i>(ditulis dengan nama Negara)</i> ☐ Tidak ditentukan Keterangan: <i>Pilihan “Tidak ditentukan” jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak dikhususkan atau tidak dapat menentukan wilayah</i>
--	--

8. Frekuensi Pelaksanaan
Komponen ini berisi jumlah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang dilaksanakan oleh PUJK.

No.	Komponen	Rencana
9.	Frekuensi Pelaksanaan	... kali pelaksanaan (dapat diisi lebih dari satu)

9. Kerja Sama/Kolaborasi Pelaksanaan
PUJK dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. Pihak lain dimaksud antara lain otoritas, instansi pemerintah, PUJK lain, badan usaha, organisasi, akademisi, agen perorangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Dalam hal PUJK melakukan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan bekerja sama dengan pihak lain, laporan rencana dan realisasi memuat peran atau kontribusi PUJK lain dan pihak lain dimaksud. Peran atau kontribusi pihak lain tersebut dapat berupa antara lain penyediaan sumber daya manusia, dana, dan/atau tempat.

No.	Komponen	Rencana
10.	Kerja Sama/ Kolaborasi Pelaksanaan	Apakah kegiatan dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak lain? ☐ ya ☐ peran PUJK dan pihak lain (PUJK) dalam kegiatan: 1. ... (nama PUJK pelapor) ... (deskripsi dari peran PUJK pelapor) 2. ... (nama pihak 1) ...(deskripsi dari peran pihak 1), 3. ... (nama pihak 2) ...(deskripsi dari peran pihak 2), 4. ... (nama pihak 3) ... (deskripsi dari peran pihak 3) dst. ☐ peran PUJK dan pihak lain (di luar PUJK) dalam kegiatan: 1. ... (nama PUJK pelapor) ... (deskripsi dari peran PUJK pelapor), 2. ... (nama pihak lain 1) ... (deskripsi dari peran pihak 1), 3. (nama pihak lain 2) ... (deskripsi dari peran pihak 2), 4. ... (nama pihak lain 3) ... (deskripsi dari peran pihak lain 3) (diisi apabila ada). ☐ tidak

10. Indikator dan Bentuk Evaluasi
a. Indikator Evaluasi

Komponen Indikator evaluasi berisi alat ukur dalam mengetahui hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. Hasil kegiatan diukur antara lain melalui:

- 1) perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target konsumen;
- 2) penyediaan produk dan/atau layanan;
- 3) keberlangsungan atas produk dan/atau layanan:
 - a) peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan; dan/atau
 - b) peningkatan kualitas pengguna produk dan/atau layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat.

b. Bentuk Evaluasi

Bentuk evaluasi merupakan cara/metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan atau mengetahui hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. Bentuk evaluasi tersebut antara lain:

- 1) memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan;
- 2) memperhatikan data dan laporan dari periode sebelumnya;
- 3) melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan perencanaan dan realisasi kegiatan;
- 4) menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan; dan/atau
- 5) metode lainnya yang digunakan oleh PUJK.

No.	Komponen	Rencana
11.	Indikator Evaluasi	A. Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan ☐ kesesuaian bentuk pelaksanaan kegiatan ☐ kesesuaian sasaran ☐ kesesuaian jumlah target konsumen ☐ kesesuaian jadwal ☐ kesesuaian frekuensi ☐ kesesuaian wilayah ☐ lainnya: ... (sebutkan) <i>(mandatory semua pilihan terisi)</i> B. Evaluasi Dampak Kegiatan Perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target konsumen ☐ penambahan jaringan kantor ☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain ☐ penambahan saluran distribusi atau <i>delivery channel</i> produk dan/atau layanan ☐ penyediaan sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus ☐ ketersediaan program pemerintah atau otoritas ☐ lainnya: ... (sebutkan) <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>

		Penyediaan produk dan/atau layanan ☐ produk dan/atau layanan baru yang bersifat umum ☐ produk dan/atau layanan sederhana ☐ produk dan/atau layanan tematik ☐ melaksanakan program pemerintah atau otoritas ☐ lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) Keberlangsungan atas produk dan/atau layanan Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan ☐ jumlah rekening tabungan/ kredit/ pembiayaan/ efek/ dana pensiun. ☐ jumlah transaksi ☐ jumlah polis asuransi ☐ jumlah sertifikat penjaminan ☐ jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura ☐ jumlah transaksi gadai ☐ penambahan jumlah kepemilikan atas produk dan/atau layanan ☐ lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu) Peningkatan kualitas pengguna produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat ☐ jumlah konsumen tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan lainnya ☐ kemampuan konsumen untuk dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai ☐ penambahan jumlah konsumen dan/atau masyarakat, yang memiliki produk dan/atau layanan ☐ lainnya: ... (sebutkan) (dapat diisi lebih dari satu)
--	--	---

12.	Bentuk Evaluasi	☐ memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan ☐ memperhatikan data dan laporan dari periode - periode sebelumnya ☐ melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan perencanaan dan realisasi kegiatan ☐ menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan ☐ lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> <i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>
-----	------------------------	--

III. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI KEGIATAN

A. Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan

Laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana nomor 1 sampai dengan nomor 16 Romawi II huruf A di atas dengan disertai hasil evaluasi dan dokumentasi yang telah dilakukan.

- 1. Hasil Evaluasi
 - a. PUJK melakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan maupun dampak kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
 - b. Hasil evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan maupun dampak kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan menilai perkembangan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan setiap tahun.
 - c. Hasil evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat perbandingan kesesuaian pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang direncanakan dengan realisasinya.
 - d. Hasil evaluasi terhadap dampak kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:
 - a) Edukasi Keuangan, antara lain:
 - 1) perbandingan hasil sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan (*pre-test* dan *post-test*);
 - 2) hasil jajak pendapat peserta kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan terkait kesesuaian topik pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - 3) hasil survei tingkat pemahaman peserta kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan;
 - b) Pengembangan sarana dan prasarana, antara lain:
 - 1) ketersediaan sarana dan prasarana;
 - 2) kesesuaian fungsi sarana dan prasarana yang dibangun/dikembangkan; dan/atau
 - 3) kemampuan sumber daya manusia /pelatih/fasilitator menyampaikan materi ajar.
 - e. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c juga dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

No.	Komponen	Realisasi
17.	Hasil Evaluasi	☐ Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan (secara sistem akan mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan pilihan penyesuaian) Edukasi Keuangan

		☐ kesesuaian bentuk pelaksanaan ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ kesesuaian metode pelaksanaan ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ kesesuaian materi ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ kesesuaian sasaran peserta ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ kesesuaian jumlah peserta ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ kesesuaian waktu pelaksanaan ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ kesesuaian wilayah pelaksanaan ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ kesesuaian biaya yang dikeluarkan ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... Pengembangan Sarana dan Prasarana
--	--	---

		☐ kesesuaian fungsi sarana dan prasarana dengan tujuan pengembangan ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ kesesuaian materi dengan tujuan penyusunan materi ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ kesesuaian kompetensi sumber daya manusia dengan tujuan Edukasi Keuangan ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ lainnya: ... <i>(sebutkan)</i> ☐ sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> ☐ tidak sesuai rencana, ... <i>(deskripsi)</i> hal-hal yang bisa diperbaiki ... ☐ Evaluasi Dampak Kegiatan <i>(secara sistem akan mengacu pada parameter pemantauan dilengkapi dengan pilihan penyesuaian)</i> ☐ Edukasi Keuangan ☐ Pengetahuan Membandingkan pengetahuan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan ☐ meningkat, ...% ☐ tetap ☐ menurun, ...% ☐ Keterampilan Membandingkan keterampilan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan ☐ meningkat, ...% ☐ tetap ☐ menurun, ...% ☐ Keyakinan Membandingkan keyakinan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan ☐ meningkat, ...% ☐ tetap
--	--	---

		☐ penyediaan sumber daya manusia ☐ kesesuaian rekrutmen sumber daya manusia dengan kebutuhan Edukasi Keuangan ☐ baik, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ cukup baik, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ kurang baik, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ lainnya:...(sebutkan) (<i>dapat diisi lebih dari satu</i>) ☐ pelatihan sumber daya manusia ☐ kemampuan sumber daya manusia dalam menyampaikan materi ajar ☐ baik, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ cukup baik, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ kurang baik, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ kemampuan <i>trainer/facilitator</i> menyampaikan materi ajar ☐ baik, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ cukup baik, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ kurang baik, ... (<i>deskripsi</i>) ☐ lainnya: ... (<i>sebutkan</i>) ☐ penyediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan yang diakses oleh konsumen dan/atau masyarakat ☐ ketersediaan informasi karakteristik produk dan/atau layanan yang diakses kepada konsumen dan/atau masyarakat ☐ tersedia dalam bentuk: .. (<i>sebutkan</i>) ☐ tidak tersedia ☐ kesesuaian informasi dengan tujuan penyusunan materi ☐ sesuai: .. (<i>deskripsi</i>) ☐ tidak sesuai ☐ lainnya: .. (<i>Sebutkan</i>)
--	--	---

2. Dokumentasi
- PUJK mengunggah dokumentasi pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang dapat berupa antara lain foto dan/atau video.

No.	Komponen	Realisasi
18.	Dokumentasi	... (diisi dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan)

B. Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan Untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan

Laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana nomor 1 sampai dengan nomor 12 Romawi II huruf B yang disertai hasil evaluasi dan dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

- 1. Hasil Evaluasi
 - a. PUJK melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.
 - b. Hasil evaluasi terhadap hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan menilai perkembangan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan setiap tahun.
 - c. Hasil evaluasi terhadap hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat perbandingan evaluasi hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang direncanakan dengan realisasinya.
 - d. Hasil evaluasi terhadap hasil kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:
 - 1) peningkatan dan/atau ketersediaan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan;
 - 2) peningkatan dan/atau ketersediaan produk dan/atau layanan;
 - 3) peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan;
 - 4) peningkatan kualitas pengguna produk dan/atau layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau masyarakat; dan/atau
 - 5) kesesuaian realisasi dengan perencanaan terkait dengan:
 - a) bentuk pelaksanaan;
 - b) sasaran kegiatan;
 - c) jumlah target konsumen;
 - d) jadwal;
 - e) wilayah;
 - f) frekuensi pelaksanaan; dan/atau
 - g) biaya yang dikeluarkan.
 - e. Hasil evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c juga dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan pengembangan produk dan/atau layanan.

No.	Komponen	Realisasi
13.	Hasil Evaluasi	(secara sistem akan mengacu pada indikator evaluasi dan bentuk pelaksanaan dilengkapi dengan hasil evaluasi) A. Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan ☐ kesesuaian bentuk pelaksanaan kegiatan ☐ kesesuaian sasaran ☐ kesesuaian jumlah target konsumen ☐ kesesuaian jadwal ☐ kesesuaian frekuensi

	☐ kesesuaian wilayah ☐ lainnya: ... (sebutkan) (mandatory semua pilihan terisi)																																							
	B. Evaluasi Dampak Kegiatan Perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target Konsumen <table><thead><tr><th></th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐ penambahan jaringan kantor</td><td>... (diisi dengan jumlah)</td><td>... (diisi dengan jumlah)</td></tr><tr><td>☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain</td><td>... (diisi dengan jumlah)</td><td>... (diisi dengan jumlah)</td></tr><tr><td>☐ penambahan saluran distribusi atau <i>delivery channel</i> produk dan/atau layanan</td><td>... (diisi dengan jumlah)</td><td>... (diisi dengan jumlah)</td></tr><tr><td>☐ penambahan sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus</td><td>... (diisi dengan jumlah)</td><td>... (diisi dengan jumlah)</td></tr><tr><td>☐ dukungan pada program pemerintah atau otoritas</td><td>.. (program yang direncanakan)</td><td>... (realisasi program)</td></tr><tr><td>☐ lainnya: ... (sebutkan)</td><td>... (diisi dengan jumlah/presentase)</td><td>... (diisi dengan jumlah/presentase)</td></tr></tbody></table> (dapat diisi lebih dari satu) Penyediaan produk dan/atau layanan <table><thead><tr><th></th><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐ jumlah produk dan/atau layanan yang bersifat umum</td><td>... (diisi dengan jumlah)</td><td>... (diisi dengan jumlah)</td></tr><tr><td>☐ jumlah produk dan/atau layanan sederhana</td><td>... (diisi dengan jumlah)</td><td>... (diisi dengan jumlah)</td></tr><tr><td>☐ jumlah produk dan/atau layanan tematik</td><td>... (diisi dengan jumlah)</td><td>... (diisi dengan jumlah)</td></tr><tr><td>☐ melaksanakan program pemerintah atau otoritas</td><td>... (program yang dilaksanakan)</td><td>... (realisasi program yang dilaksanakan)</td></tr><tr><td>☐ lainnya: ... (sebutkan)</td><td>... (diisi dengan jumlah/presentase)</td><td>... (diisi dengan jumlah/presentase)</td></tr></tbody></table>		Sebelum	Sesudah	☐ penambahan jaringan kantor	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	☐ penambahan saluran distribusi atau <i>delivery channel</i> produk dan/atau layanan	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	☐ penambahan sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	☐ dukungan pada program pemerintah atau otoritas	.. (program yang direncanakan)	... (realisasi program)	☐ lainnya: ... (sebutkan)	... (diisi dengan jumlah/presentase)	... (diisi dengan jumlah/presentase)		Sebelum	Sesudah	☐ jumlah produk dan/atau layanan yang bersifat umum	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	☐ jumlah produk dan/atau layanan sederhana	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	☐ jumlah produk dan/atau layanan tematik	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)	☐ melaksanakan program pemerintah atau otoritas	... (program yang dilaksanakan)	... (realisasi program yang dilaksanakan)	☐ lainnya: ... (sebutkan)	... (diisi dengan jumlah/presentase)	... (diisi dengan jumlah/presentase)
	Sebelum	Sesudah																																						
☐ penambahan jaringan kantor	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)																																						
☐ penambahan kerja sama dengan pihak lain	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)																																						
☐ penambahan saluran distribusi atau <i>delivery channel</i> produk dan/atau layanan	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)																																						
☐ penambahan sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)																																						
☐ dukungan pada program pemerintah atau otoritas	.. (program yang direncanakan)	... (realisasi program)																																						
☐ lainnya: ... (sebutkan)	... (diisi dengan jumlah/presentase)	... (diisi dengan jumlah/presentase)																																						
	Sebelum	Sesudah																																						
☐ jumlah produk dan/atau layanan yang bersifat umum	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)																																						
☐ jumlah produk dan/atau layanan sederhana	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)																																						
☐ jumlah produk dan/atau layanan tematik	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)																																						
☐ melaksanakan program pemerintah atau otoritas	... (program yang dilaksanakan)	... (realisasi program yang dilaksanakan)																																						
☐ lainnya: ... (sebutkan)	... (diisi dengan jumlah/presentase)	... (diisi dengan jumlah/presentase)																																						

<i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>		
Keberlangsungan atas produk dan/atau layanan		
1. Peningkatan pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan		
☐ jumlah rekening tabungan/ kredit/ pembiayaan/ efek/ dana pensiun	Sebelum	Sesudah
	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>
☐ jumlah transaksi	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>
☐ jumlah polis asuransi	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>
☐ jumlah sertifikat penjaminan	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>
☐ jumlah pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>
☐ jumlah transaksi gadai	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>
☐ penambahan jumlah kepemilikan atas produk dan/atau layanan	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>
☐ lainnya: ... (sebutkan)	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>
<i>(dapat diisi lebih dari satu)</i>		
2. Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat		
	Sebelum	Sesudah
☐ jumlah konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>	... <i>(diisi dengan jumlah)</i>
☐ kemampuan konsumen untuk dapat mengukur dan menganalisis	... <i>(diisi dengan kondisi)</i>	... <i>(diisi dengan kondisi)</i>

		produk dan/atau layanan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan serta dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/ penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai		
		☐ penambahan jumlah konsumen dan/atau masyarakat, yang memiliki produk dan/atau layanan	... (diisi dengan jumlah)	... (diisi dengan jumlah)
		☐ lainnya: ... (sebutkan)	... (diisi dengan jumlah/ kondisi)	... (diisi dengan jumlah/ kondisi)
		(dapat diisi lebih dari satu)		
		Kesesuaian realisasi dengan perencanaan terkait dengan: ☐ kesesuaian bentuk pelaksanaan kegiatan ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi bentuk pelaksanaan kegiatan ... (deskripsi) ☐ kesesuaian sasaran ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi sasaran ... (deskripsi) ☐ kesesuaian jumlah target konsumen ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi jumlah target konsumen... (deskripsi) ☐ kesesuaian jadwal ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi jadwal... (deskripsi) ☐ kesesuaian frekuensi		

		☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi frekuensi... (deskripsi) ☐ kesesuaian wilayah ☐ sesuai rencana ☐ tidak sesuai rencana, evaluasi wilayah... (deskripsi) (dapat diisi lebih dari satu)
--	--	---

2. Dokumentasi
- PUJK mengunggah dokumentasi pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang dapat berupa antara lain foto dan/atau video.

No.	Komponen	Realisasi
14.	Dokumentasi	... (diisi dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERILAKU PELAKU USAHA JASA
KEUANGAN, EDUKASI, DAN
PELINDUNGAN KONSUMEN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi